

**HASIL ANALISIS SITUASI
PREVALENSI STUNTING
KABUPATEN BATANG TAHUN 2022**



**Bapelitbang Kabupaten Batang
2022**

I. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

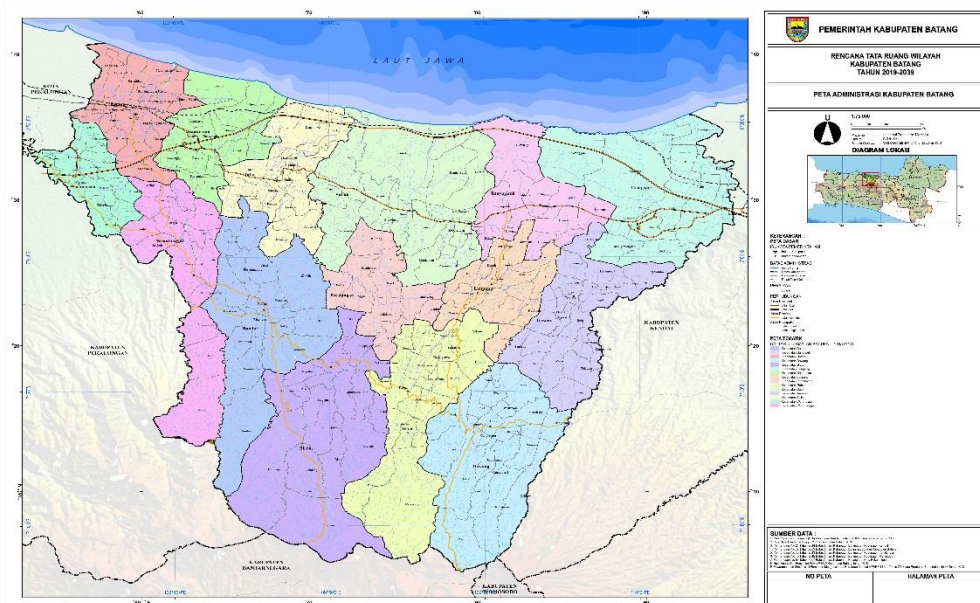
A. Aspek Geografi Dan Demografi

1. Geografis

Luas wilayah Kabupaten Batang mencapai 85.721 (delapan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh satu) hektar dengan batas-batas wilayah Kabupaten Batang secara administratif adalah:

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Kendal
- Sebelah Selatan : Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara
- Sebelah Barat : Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan

Gambar 1.1
Peta Administrasi Kabupaten Batang



Sumber : Bapelitbang Kabupaten Batang 2019

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Kabupaten Batang yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2006, secara administratif wilayah Kabupaten Batang terbagi dalam 15 (lima belas) kecamatan yang terdiri dari 239 desa dan 9 kelurahan.

Kecamatan Batang terdiri dari 12 desa 9 kelurahan; Kecamatan Wonotunggal terdiri dari 15 desa; Kecamatan Warungasem terdiri dari 18 desa; Kecamatan Bandar terdiri dari 17 desa; Kecamatan Blado terdiri dari 18 desa; Kecamatan Reban terdiri dari 19 desa; Kecamatan Tulis terdiri dari 17 desa; Kecamatan Subah terdiri dari 17 desa; Kecamatan Limpung terdiri dari 17 desa; Kecamatan Gringsing terdiri dari 15 desa; Kecamatan Bawang terdiri

dari 20 desa; Kecamatan Tersono terdiri dari 20 desa; Kecamatan Kandeman terdiri dari 13 desa; Kecamatan Pecalungan terdiri dari 10 desa, Kecamatan Subah terdiri dari 17 Desa; serta Kecamatan Banyuputih terdiri dari 11 desa.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Batang

Kecamatan	Luas (Ha)	Desa/Kel	Dukuh	RT	RW
01. Wonotunggal	5.565,54	15	71	197	61
02. Bandar	7.936,76	17	79	351	71
03. Blado	9.644,78	18	74	234	68
04. Reban	6.947,07	19	67	248	68
05. Bawang	7.696,92	20	88	354	104
06. Tersono	5.135,60	20	79	263	73
07. Gringsing	7.989,29	15	89	313	83
08. Limpung	3.271,72	17	80	233	70
09. Banyuputih	4.242,36	11	49	175	47
10. Subah	9.166,67	17	68	287	72
11. Pecalungan	3.342,14	10	56	182	54
12. Tulis	4.419,15	17	52	173	52
13. Kandeman	4.060,20	13	62	231	59
14. Batang	3.931,44	21	114	493	111
15. Warungasem	2.445,61	18	68	221	73
Jumlah	85.721	248	1.096	3.955	1.066

Sumber: RTRW Kab. Batang, 2019

Wilayah geografis Kabupaten Batang berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Secara astronomis daerah ini terletak antara 6° 51' 46" sampai 7° 11' 47" Lintang Selatan dan antara 109° 40' 19" sampai 110° 03' 06" Bujur Timur. Posisi tersebut menempatkan wilayah Kabupaten Batang, utamanya Ibu Kota Pemerintahannya pada jalur ekonomi Pulau Jawa sebelah Utara. Arus transportasi dan mobilitas yang tinggi di jalur pantura memberikan kemungkinan Kabupaten Batang berkembang cukup prospektif di sektor jasa transit dan transportasi.

Kondisi wilayah Kabupaten Batang merupakan kombinasi antara daerah pantai, dataran rendah dan pegunungan. Dengan kondisi ini Kabupaten Batang mempunyai potensi yang sangat besar untuk agroindustri, agrowisata dan agrobisnis.

Jarak ibu kota Kabupaten Batang dengan ibu kota daerah-daerah lain adalah sebagai berikut:

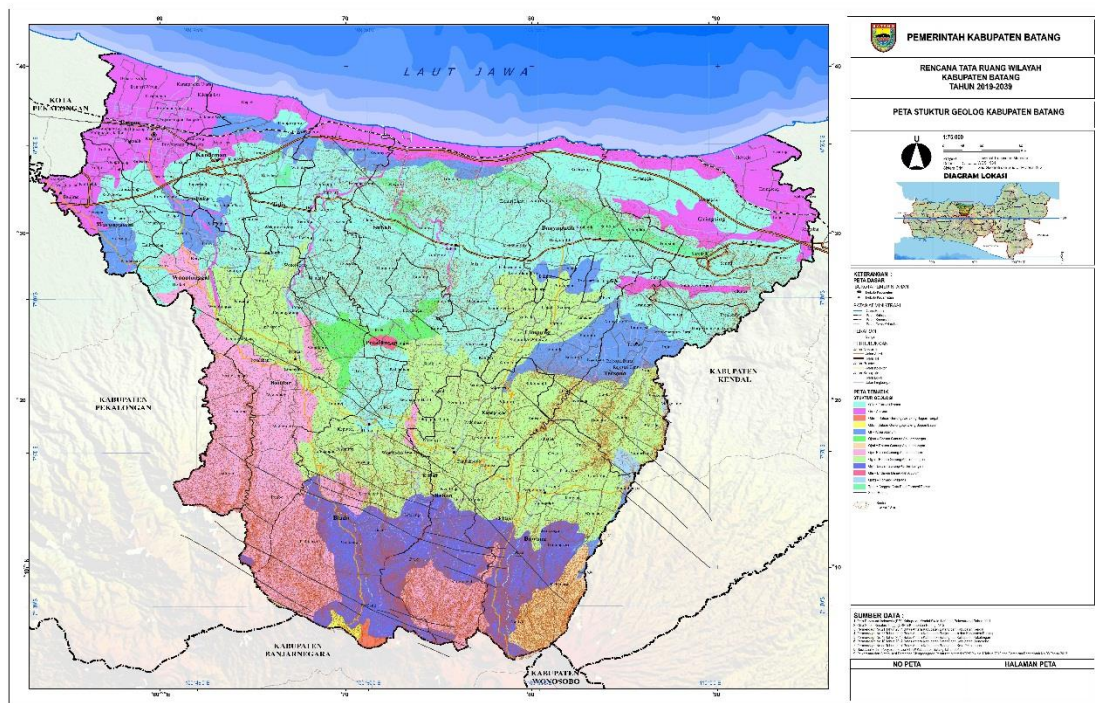
- 1) Pekalongan : 9 km
- 2) Pemalang : 43 km
- 3) Tegal : 72 km

- 4) Brebes : 85 km
- 5) Cirebon : 144 km
- 6) Jakarta : 392 km
- 7) Kendal : 64 km
- 8) Semarang : 93 km
- 9) Surabaya : 480 km

Keadaan topografi wilayah Kabupaten Batang terbagi atas tiga bagian yaitu pantai, dataran rendah dan wilayah pegunungan. Kondisi wilayah yang merupakan kombinasi antara daerah pantai, dataran rendah dan pegunungan di Kabupaten Batang merupakan potensi yang amat besar untuk dikembangkan pembangunan daerah bercirikan agroindustri, agrowisata dan agrobisnis. Wilayah Kabupaten Batang sebelah selatan yang bercorak pegunungan misalnya sangat potensial untuk dikembangkan menjadi wilayah pembangunan dengan basis agroindustri dan agrowisata. Basis agroindustri ini mengacu pada berbagai macam hasil tanaman perkebunan seperti: teh, kopi, coklat dan sayuran. Selain itu juga memiliki potensi wisata alam yang prospektif di masa datang

Dari kondisi geologi wilayah Kabupaten Batang sebagian besar adalah pegunungan dengan susunan tanah sebagai berikut: *latosol* 69,66%; *andosol* 13,23%; *alluvial* 11,47% dan *podsolik* 5,64%. Susunan tanah tersebut mempengaruhi pemanfaatan tanah yang sebagian besar ditujukan untuk budidaya hutan, perkebunan dan pertanian. Adapun penguasaan hutan dan perkebunan mayoritas di tangan negara. Sedangkan pertanian baik kering maupun basah (irigasi sederhana dan irigasi teknis) dilakukan oleh warga setempat.

Gambar 1.2
Peta Geologi Kabupaten Batang



Sumber : Bapelitbang Kabupaten Batang 2018

2. Demografi

Pada tahun 2021, jumlah penduduk Kabupaten Batang berdasarkan Sensus Penduduk 2021 sebanyak 810.393 jiwa dengan komposisi 409.065 laki-laki dan 401.328 perempuan. Penduduk terbanyak di Kecamatan Batang sebanyak 16,67 persen dan paling sedikit di kecamatan Pecalungan 4,03 persen dari total penduduk Kabupaten Batang. Laju pertumbuhan penduduk di tahun 2021 sebesar 1,08 persen. Kepadatan penduduk di Kabupaten Batang tahun 2021 mencapai 1.027 jiwa/km². Kepadatan penduduk di 15 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Batang dengan kepadatan sebesar 3.933 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Blado sebesar 589 jiwa/km².

Tabel 2.2

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin
Kabupaten Batang 2021

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Total
		Laki Laki	Perempuan	
1	Wonotunggal	19.431	19.051	38.482
2	Bandar	36.309	36.142	72.451
3	Blado	23.014	23.128	46.142
4	Reban	20.715	20.045	40.760
5	Bawang	27.940	28.154	56.094
6	Tersono	20.675	20.254	40.929
7	Gringsing	32.199	31.465	63.664
8	Limpung	22.568	21.774	44.360
9	Banyuputih	18.740	18.317	37.057

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Total
		Laki Laki	Perempuan	
10	Subah	27.203	26.378	53.581
11	Pecalungan	16.620	16.109	32.729
12	Tulis	20.091	19.198	39.289
13	Kandeman	27.959	27.556	55.515
14	Batang	68.425	66.683	135.108
15	Warungasem	27.158	27.074	54.232
Jumlah		409.065	401.328	810.393

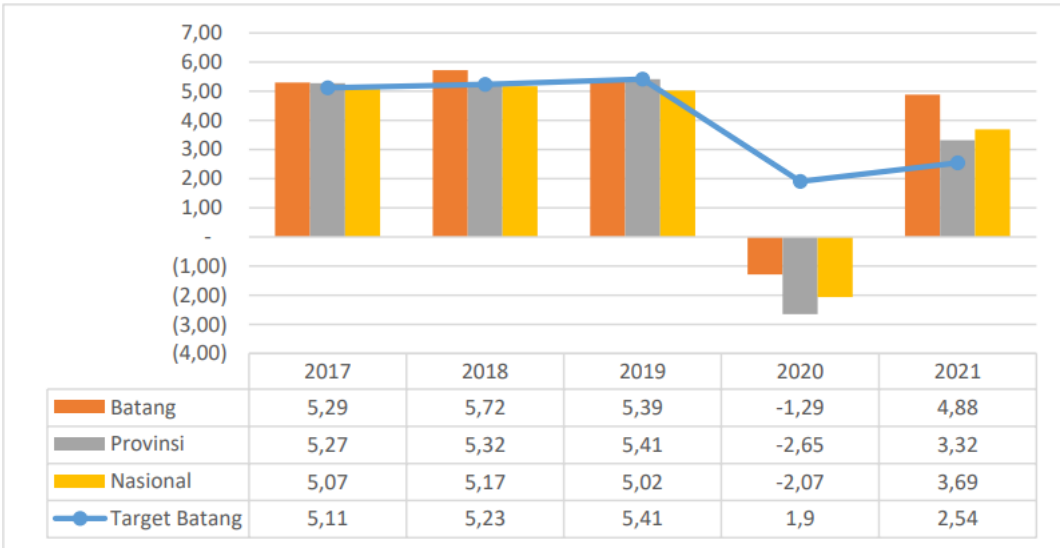
Sumber: Kabupaten Batang Dalam Angka, 2022

B. Kondisi Sosial Ekonomi

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang dalam kurun waktu lima tahun terakhir fluktuatif dengan kecenderungan meningkat pada kisaran minus 1,29 persen hingga 5,72 persen. Pada tahun 2017, perekonomian Kabupaten Batang tumbuh sebesar 5,55 persen, terus meningkat pada tahun 2018 menjadi sebesar 5,72 persen dan menurun pada tahun 2019 menjadi 5,39 persen. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang mengalami kontraksi sebesar 1,29 persen akibat dari adanya pandemi Covid-19. Capaian ini jauh lebih rendah dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 1,90 persen. Bukan hanya di Kabupaten Batang, pandemi Covid-19 juga menyebabkan kondisi ekonomi Provinsi Jawa Tengah mengalami kontraksi sebesar 2,65 persen dan ekonomi nasional mengalami kontraksi sebesar 2,07 persen. Pada tahun 2021 perekonomian Kabupaten Batang meningkat menjadi 4,88 persen, lebih tinggi dibanding target pertumbuhan ekonomi tahun 2021 yaitu sebesar 2,54 persen. Angka ini juga masih lebih tinggi dibanding dengan capaian provinsi dan nasional yakni sebesar 3,32 persen dan 3,69 persen. Kondisi ekonomi Kabupaten Batang jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dari tahun 2017 – 2021 sebagaimana tersaji dalam grafik gambar berikut :

Gambar 1.3
 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Batang dibandingkan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021



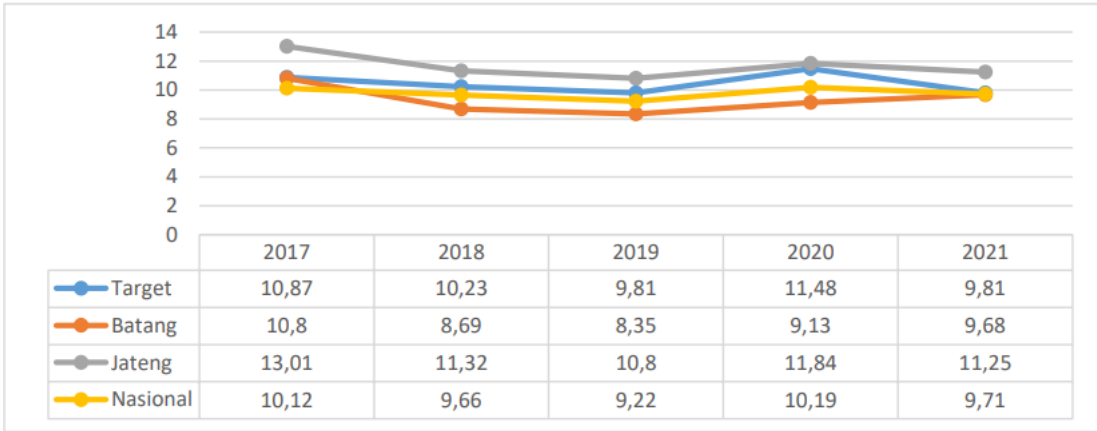
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

2. Kondisi Kemiskinan

Angka kemiskinan Kabupaten Batang berfluktuasi menurun pada periode tahun 2017-2021, dari sebesar 10,8% pada tahun 2017 menjadi 9,68% pada tahun 2021. Kondisi kemiskinan Kabupaten Batang mengalami kenaikan pada tahun 2020 jika dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 49.394 KK terdampak secara ekonomi dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Hal inilah menyebabkan angka kemiskinan Kabupaten Batang tahun 2020 naik menjadi 9,13% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 8,35%. Angka kemiskinan tahun 2021 lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka kemiskinan tahun 2020 yaitu sebesar 9,13%. Hal ini disebabkan dampak pandemi Covid masih belum sepenuhnya pulih, terutama pada masyarakat yang terdampak masih belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Meskipun angka kemiskinan meningkat dari tahun sebelumnya, namun capaian ini masih lebih rendah dari angka target tahun 2021 sebesar 9,81% masih lebih rendah jika dibandingkan dengan angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebesar 11,25%. Hal ini didorong oleh adanya upaya Pemerintah Kabupaten Batang melalui upaya mengurangi beban pengeluaran masyarakat dengan memberikan kemudahan akses berupa bantuan atau stimulan pendidikan, kesehatan, pangan, rumah layak, dan akses KB, optimalisasi pemberdayaan masyarakat, serta bantuan sosial/subsidi untuk masyarakat miskin, penanganan masalah kesejahteraan sosial dan jaminan sosial dan jaminan kesehatan warga miskin. Persentase penduduk miskin mengalami peningkatan pada tahun 2021, namun angka

kemiskinan Kabupaten Batang masih lebih rendah dibandingkan Nasional sebesar 9,71%. Selengkapnya pada gambar berikut:

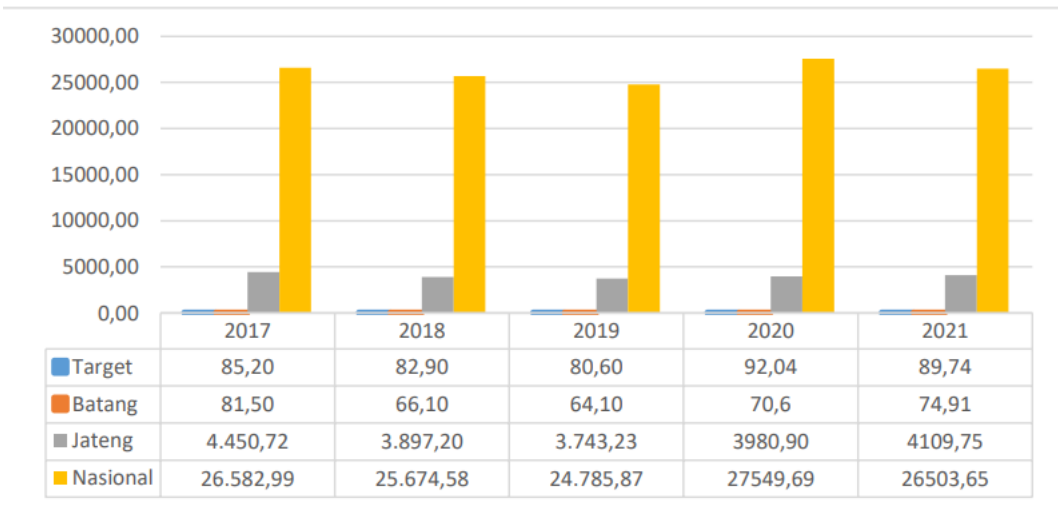
Gambar 1.4
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Batang dibandingkan Jawa Tengah dan Nasional (2017-2021)



Sumber : BPS Batang, 2022

Sejalan dengan meningkatnya persentase penduduk miskin, jumlah penduduk miskin Kabupaten Batang periode tahun 2017-2021 juga berfluktuasi menurun, dimana tahun 2017 sebanyak 81,50 ribu jiwa mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi sebanyak 64,10 ribu jiwa. Namun karena dampak pandemi Covid-19 jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan menjadi sebesar 70,6 ribu jiwa pada tahun 2020 dan kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 74,91 ribu jiwa, selengkapnya tersaji pada gambar berikut:

Gambar 1.5
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Batang Tahun 2017-2021 (ribu jiwa)

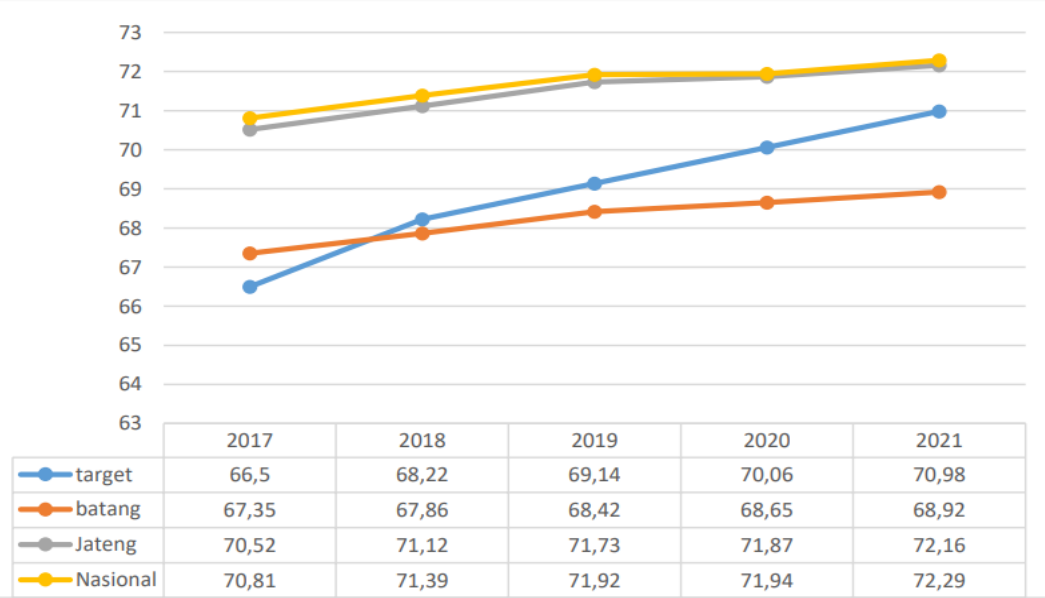


Sumber : BPS Provinsi Jateng, 2022

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Batang menurut metode baru menunjukkan ke arah positif setiap tahunnya dimana pada kurun waktu lima tahun terakhir IPM Kabupaten Batang terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 angka IPM Kabupaten Batang sebesar 67,35 terus mengalami peningkatan, bahkan di tahun 2020 dan 2021 meskipun dalam kondisi Pandemi Covid-19 nilai IPM Kabupaten Batang masih terus meningkat menjadi 68,92. Meskipun nilai IPM Kabupaten Batang terus mengalami peningkatan, namun IPM Kabupaten Batang ini masih masuk dalam kategori sedang dan lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah dan capaian nasional. Perkembangan IPM Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada gambar yang tersaji dibawah ini.

Gambar 1.6
IPM Kabupaten Batang Dibandingkan dengan
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Kabupaten Batang, 2022

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Angka Harapan Hidup Kabupaten Batang menunjukkan kondisi perbaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 Angka Harapan Hidup penduduk Kabupaten Batang mencapai 74,50 tahun, terus meningkat pada tahun 2021 menjadi 74,74 tahun. Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Batang juga menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 HLS Kabupaten Batang mencapai 11,87 tahun meningkat menjadi 12,13 tahun pada tahun 2021. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Batang juga menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 RLS Kabupaten Batang

mencapai 6,61 tahun meningkat menjadi 6,88 tahun pada tahun 2021. Pengeluaran perkapita disesuaikan Kabupaten Batang menunjukkan perkembangan dalam periode tahun 2017-2021, yaitu sebesar Rp.8.805 ribu Rp/orang/tahun pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp 9,524 ribu Rp/orang /tahun pada tahun 2021.

Tabel 2.3
Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Batang 2017-2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
AHH (TH)	74,50	74,56	74,59	74,69	74,74
HLS (TH)	11,87	11,88	12,00	12,01	12,13
RLS (TH)	6,61	6,62	6,63	6,87	6,88
Pengeluaran per kapita disesuaikan (ribu Rp/orang/th)	8,805	9,203	9,573	9,431	9,524
IPM	67,35	67,86	68,42	68,65	68,92

Sumber: BPS Kabupaten Batang, 2022

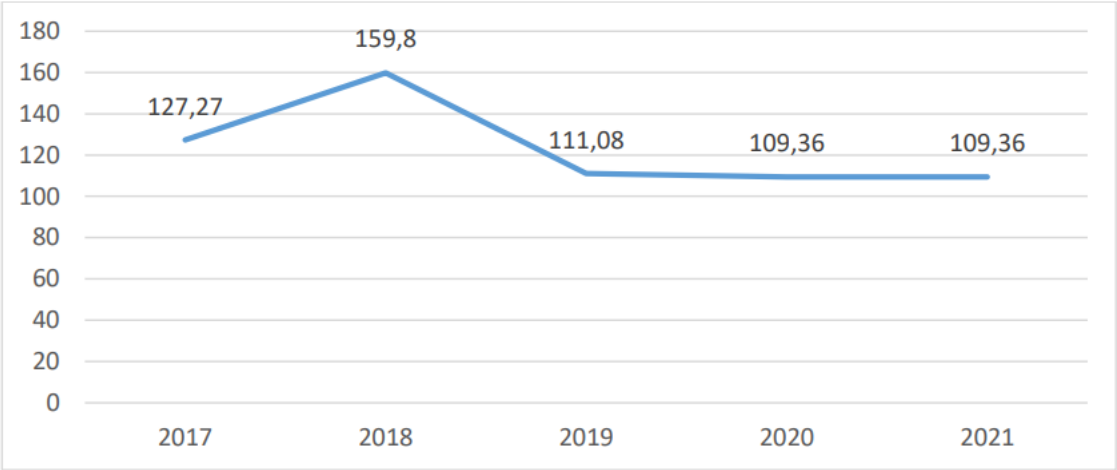
4. Kesehatan

Dalam penyelenggaraan upaya kesehatan di Kabupaten Batang terdapat beberapa fasilitas pelayanan kesehatan, baik sarana pelayanan kesehatan pemerintah, swasta maupun Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Adapun sarana pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Batang yaitu Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) sebanyak 2 (dua) Rumah Sakit meliputi RSUD Batang dan RSUD Limpung serta 1 (satu) Rumah Sakit swasta yaitu Rumah Sakit Umum QIM, puskesmas rawat inap sebanyak 4 buah, puskesmas rawat jalan sebanyak 17 buah, puskesmas pembantu sebanyak 42 buah, puskesmas keliling/ambulan sebanyak 23 buah, Poliklinik Kesehatan Desa sebanyak 200 unit serta posyandu sebanyak 1.224 buah yang tersebar di seluruh Kabupaten Batang.

Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat diantaranya melalui upaya penurunan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita dan prevalensi gizi buruk pada Balita. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu lima tahun terakhir cenderung berfluktuasi naik dan turun, dari 127,27 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2017 naik menjadi sebesar 159,8 per 100.000 kelahiran

hidup pada tahun 2018, namun kemudian terus ada penurunan hingga tahun 2021 menjadi 94,13 per 100.000 kelahiran. Kasus AKI di Kabupaten Batang antara lain disebabkan oleh masih tingginya kasus ibu hamil Kekurangan Energi Kronik (KEK) karena adanya kepercayaan pantang makan makanan tertentu di waktu hamil, komplikasi kebidanan dan masih adanya ibu hamil yang tidak memeriksakan kehamilannya secara teratur. Persentase terbesar dari AKI disebabkan oleh penyakit penyerta (bukan karena hal yang berkaitan langsung dengan kehamilan), misalnya jantung, TB dan hipertensi. Namun demikian, terdapat perbaikan sehingga terdapat penurunan angka kematian ini. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya penurunan AKI yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Batang membawa hasil positif. Upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan AKI diantaranya pemberian tablet tambah darah (Pil Cantik) pada remaja putri, pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (minimal 4 kali selama kehamilan, Melakukan kunjungan rumah pada ibu hamil yang tidak memeriksakan kehamilannya dan Memberikan PMT pada ibu hamil Kekurangan Energi Kronis, peningkatan perawatan dan non perawatan melalui penyediaan ruang persalinan dan alat kesehatan untuk persalinan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan serta melibatkan dan meningkatkan kerja sama lintas sektor, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, Karang Taruna dan Tim Penggerak PKK dalam mensosialisasikan kegiatan 5-ng dalam rangka mengenal kehamilan ibu ibu di wilayah kerjaya dengan tetap memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan.

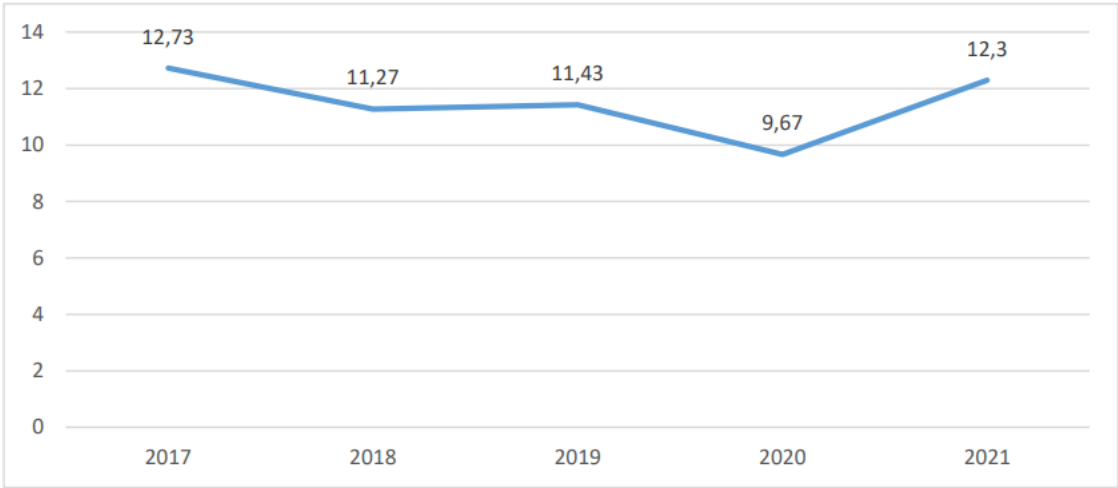
Gambar 1.7
Angka Kematian Ibu Kabupaten Batang (per 100.000 KH)
Tahun 2017-2021



Sumber: Dinkes Kabupaten Batang Tahun 2022

Angka Kematian Bayi (AKB) dalam periode tahun 2017-2021 cenderung berfluktuasi menurun dan naik, dari 12,73 per 1000 KH pada tahun 2017 turun menjadi 9,45 per 1000 KH pada tahun 2020. Namun pada tahun 2021 angka AKB naik kembali menjadi sebesar 12,3 per 1000 KH. Meningkatnya AKB ini diantaranya disebabkan oleh meningkatnya angka komplikasi neonatal dan meningkatnya kasus Berat Badan Lahir Rendah (BBLR). Beberapa upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Batang diantaranya dengan memberikan PMT pada ibu hamil KEK, pemberian ASI eksklusif, pemeriksaan neonatus dan bayi serta meningkatkan pelayanan kesehatan pada bayi dengan metode Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) serta pemberian vit A pada bayi umur 6 bulan – 1 tahun sehingga pada tahun 2020 angka AKB dapat diturunkan menjadi sebesar 9,67 per 1000 KH, namun perlu ada perbaikan kembali untuk menjadi evaluasi pada tahun 2021, karena AKB yang kembali naik.

Gambar 1.8
Angka Kematian Bayi per 1000 KH Kabupaten Batang
Tahun 2017-2021

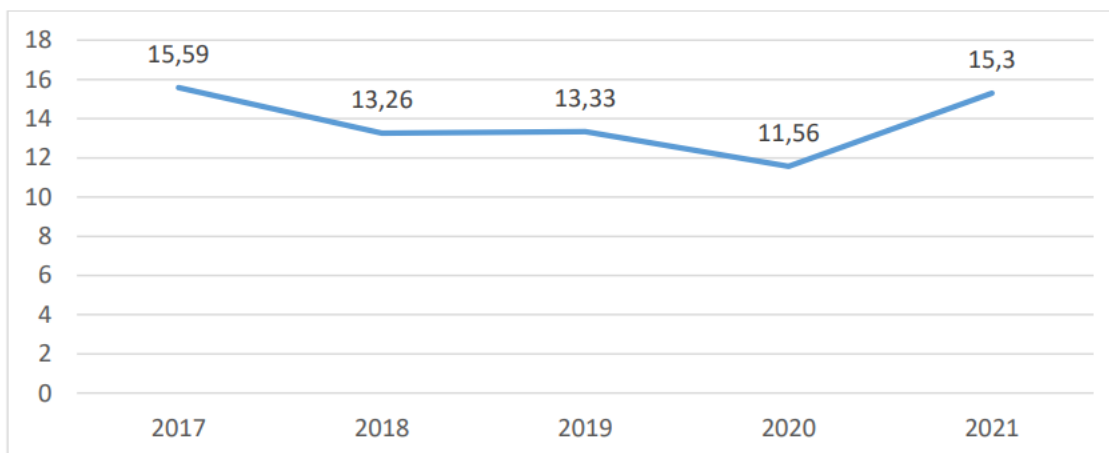


Sumber: Dinkes Kabupaten Batang Tahun 2022

Angka Kematian Balita (AKBA) di Kabupaten Batang berfluktuasi menurun dan naik dari tahun 2017-2020 yaitu dari 15,59 per 1000 KH pada tahun 2017 menurun menjadi 11,56 per 1000 KH pada tahun 2020, namun kembali naik pada tahun 2021 menjadi 15,3 per 1000 KH. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk penurunan AKBA diantaranya melakukan pemantauan tumbuh kembang bayi lewat kegiatan posyandu, pemeriksaan kesehatan balita dengan pendekatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) minimal 2 kali

setahun, memberikan imunisasi lanjutan dan memberikan vitamin A, namun perlu ditingkatkan kembali untuk kembali menurunkan angka AKBA ini.

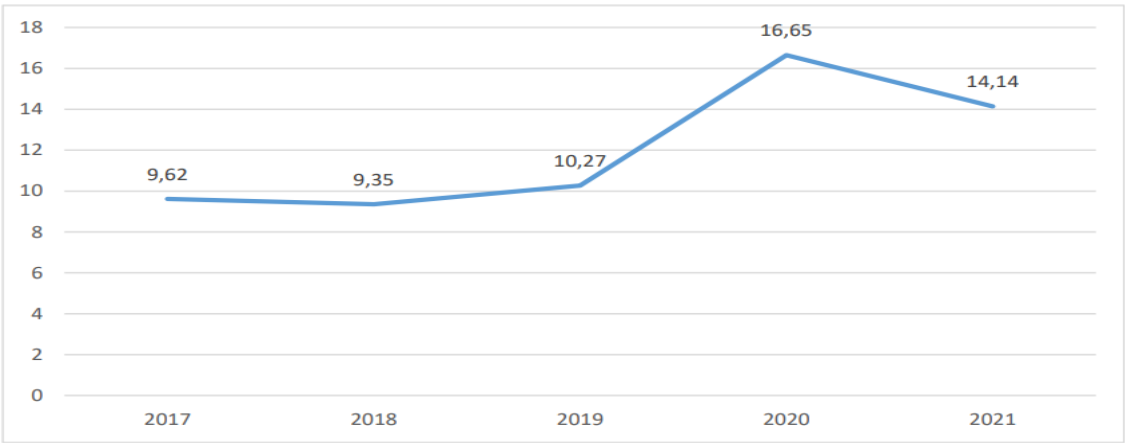
Gambar 1.9
Angka Kematian Balita per 1000 KH Kabupaten Batang
Tahun 2017-2021



Sumber: DinkesKabupaten Batang Tahun 2022

Sedangkan terkait kondisi stunting di Kabupaten Batang angkanya cenderung berfluktuasi naik namun ada sedikit penurunan di tahun terakhir dalam periode lima tahun terakhir, pada tahun 2017 sebesar 9,62% menjadi sebesar 16,65% pada tahun 2020, dan ada penurunan pada tahun 2021 menjadi 14,14%. Meningkatnya kasus stunting di Kabupaten Batang disebabkan oleh masih rendahnya pengetahuan ibu hamil mengenai pemenuhan gizi dan kesehatan sehingga menyebabkan kurangnya gizi ibu hamil dan ibu nifas, belum optimalnya pemenuhan air bersih dan sanitasi. Penambahan kasus stunting ini mengindikasikan bahwa upaya pencegahan stunting perlu dioptimalkan lagi khususnya melalui pemenuhan gizi ibu hamil, peningkatan pemberian ASI eksklusif dan MP ASI yg benar serta pengadaan kelas konseling gizi dan kesehatan. Selain hal tersebut, intervensi sensitive khususnya penyediaan sarana air bersih dan sanitasi sehat serta penguatan posyandu perlu lebih dioptimalkan lagi. walaupun begitu ada upaya dari pemerintah Kabupaten Batang dalam upaya penurunan sehingga ada hasil berupa penurunan di akhir tahun periode.

Gambar 1.10
Persentase Kasus Stunting Kabupaten Batang Tahun 2017-2021
(e-PPGBM)



Sumber: DinkesKabupaten Batang Tahun 2022

5. Kesehatan Lingkungan

Perilaku hidup bersih dan sehat menjadi hal yang penting untuk ditanamkan pada masyarakat sejak usia dini. Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat adalah melalui program Open Defecation Free (ODF) atau Bebas Buang Air Besar Sembarangan. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Batang adalah melakukan penyuluhan pola hidup sehat kepada masyarakat, sosialisasi Perda KTR, pengaktifan Germas dan penguatan lima pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat meningkatkan jumlah desa/kelurahan agar terverifikasi sebagai ODF melalui pengadaan jamban sehat dan pemberian stimulan jamban keluarga. Tahun 2020, jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Batang yang diverifikasi sebagai ODF sebanyak 68 desa/kelurahan meningkat dibandingkan tahun 2019 sebanyak 65 desa/kelurahan. Sedangkan di tahun 2021 jumlah desa terverifikasi ODF meningkat menjadi 76 desa/kelurahan. Sebaran desa yang terverifikasi ODF di Kabupaten Batang tahun 2021 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.4
Persebaran Desa ODF Kabupaten Batang Tahun 2020

NO	NAMA DESA	KECAMATAN
1	Binangun	Bandar
2	Pesalakan	Bandar
3	Wonodadi	Bandar
4	Wonomerto	Bandar
5	Kalangsono	Banyuputih
6	Penundan	Banyuputih
7	Timbang	Banyuputih
8	Cepokokuning	Batang
9	Pangempon	Bawang
10	Pasusukan	Bawang
11	Pranten	Bawang

NO	NAMA DESA	KECAMATAN
12	Sangubanyu	Bawang
13	Cokro	Blado
14	Kalipancur	Blado
15	Kalisari	Blado
16	Kalitengah	Blado
17	Surodadi	Gringsing
18	karanggeneng	Kendeman
19	Lobang	Limpung
20	Gombong	Pecalungan
21	Keninten	Pecalungan
22	Siguci	Pecalungan
23	Kalisari	Reban
24	Pacet	Reban
25	Durenombo	Subah
26	Kalimanggis	Subah
27	Harjowinangun Barat	Tersono
28	Harjowinangun Timur	Tersono
29	Kebumen	Tersono
30	Sendang	Tersono
31	Sumurbanger	Tersono
32	Tegalombo	Tersono
33	Cluwuk	Tulis
34	Kenconorejo	Tulis
35	manggis	Tulis
36	Kalipucangkulon	Batang
37	Kalisalak	Batang
38	Karanganyar	Batang
39	Kecepak	Batang
40	Pasekaran	Batang
41	Gondang	Batang
42	Sentul	Gringsing
43	Bakalan	Gringsing
44	Sempu	Limpung
45	Clapar	Subah
46	Ponowareng	Tulis
47	Posong	Tulis
48	sembojo	Tulis
49	Simbangjati	Tulis
50	Banjiran	Warungasem
51	Candiareng	Warungasem
52	Cepagan	Warungasem
53	Gapura	Warungasem
54	Lebo	Warungasem
55	Masin	Warungasem
56	Menguneng	Warungasem
57	Pejambon	Warungasem
58	Pesaren	Warungasem
59	Sariglagah	Warungasem
60	Sijono	Warungasem

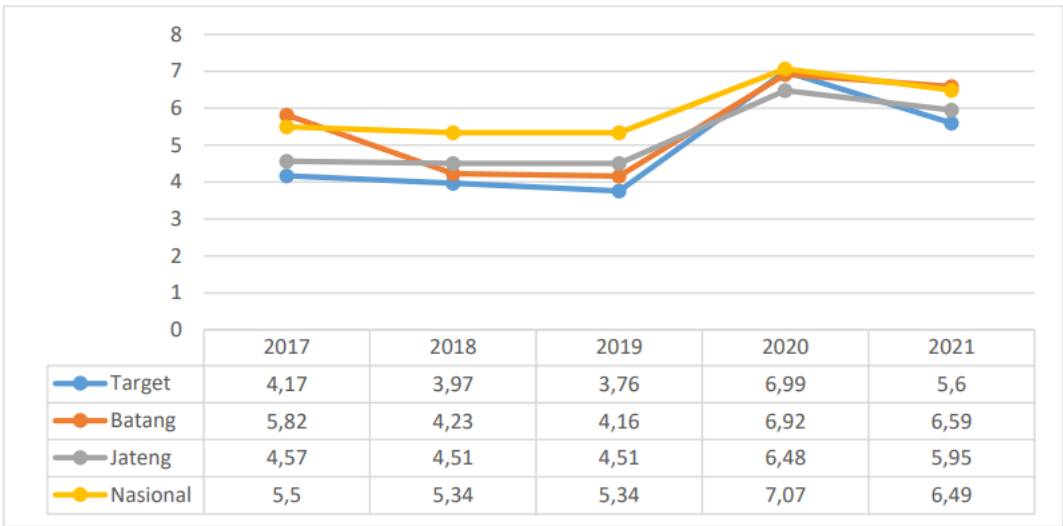
NO	NAMA DESA	KECAMATAN
61	Terban	Warungasem
62	Warungasem	Warungasem
63	Dringo	Warungasem
64	Gringgingsari	Wonotunggal
65	Kemligi	Wonotunggal
66	Silurah	Wonotunggal
67	Sodong	Wonotunggal
68	Kaliwareng	Warungasem
69	Clapar	Subah
70	Siguci	Pecalungan
71	Keniten	Pecalungan
72	Gombong	Pecalungan
73	Kemiri Timur	Subah
74	Margosono	Tersono
75	Sidalang	Tersono
76	Kedungsegog	Tulis

Sumber: Dinkes Kabupaten Batang Tahun 2022

6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Batang selama periode 2017-2021 fluktuatif, yaitu sebesar 5,82 persen pada tahun 2017 terus menurun menjadi sebesar 4,16 persen pada tahun 2019. Pandemi Covid-19 berdampak pada meningkatnya angka TPT menjadi sebesar 6,92 persen pada tahun 2020. Dampak Pandemi Covid-19 dirasakan cukup signifikan utamanya pada masyarakat yang saat ini termasuk dalam kelompok 40 persen berpenghasilan rendah, dan masyarakat yang berpenghasilan tidak tetap setiap bulan, yang terbanyak adalah mereka yang bekerja di sektor informal, seperti pelaku usaha UKM, pedagang pasar, pedagang kaki lima, ojek online, dan lain-lainnya. Kondisi inilah kemudian yang berdampak pada meningkatnya tingkat pengangguran di Kabupaten Batang pada tahun 2020. Beberapa upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Batang dalam penanganan dampak Covid-19 diantaranya melalui penciptaan dan perluasan lapangan kerja utamanya bagi masyarakat terdampak Covid-19 dengan program padat karya di sektor infrastruktur, peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan kerja dan serta mendorong kemandirian berwirausaha melalui bantuan alat. Upaya tersebut berdampak pada menurunnya angka TPT pada tahun 2021 menjadi sebesar 6,59%. Namun demikian, meskipun angka TPT menurun, angka TPT ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,95 persen dan angka TPT Nasional sebesar 6,49 persen.

Gambar 1.11
 Perkembangan TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) Kabupaten Batang
 dibandingkan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

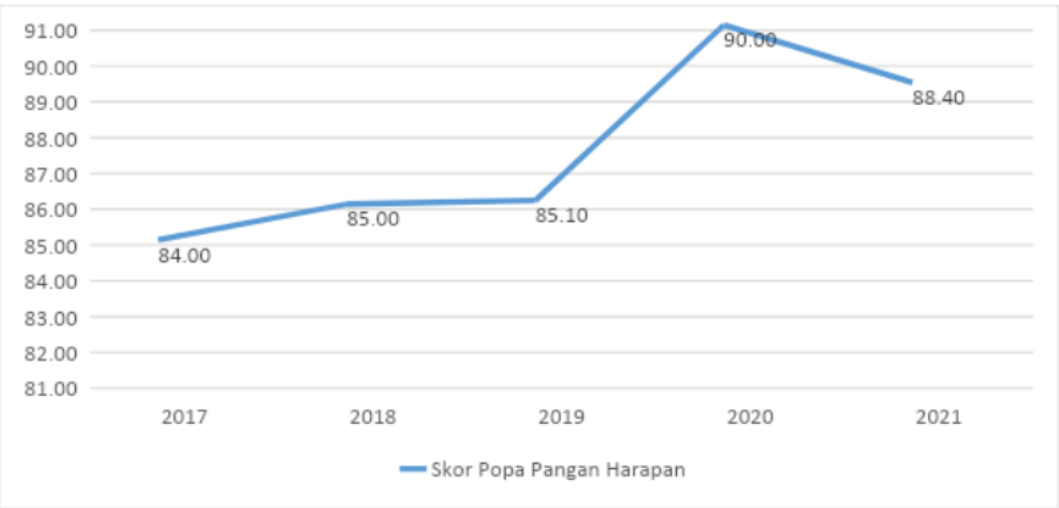


Sumber : BPS Kabupaten Batang, 2022

7. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Keragaman pola konsumsi pangan ditunjukkan dengan Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH dalam periode lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, pada tahun 2017 sebesar 84 menjadi sebesar 90 pada tahun 2020, meskipun sempat mengalami penurunan menjadi 84 pada tahun 2017. Hal tersebut disebabkan karena kualitas konsumsi pangan masyarakat yang ditunjukkan melalui skor PPH masih belum kondisi ideal. Kondisi pola pangan daerah yang semakin meningkat di tahun 2020 mengindikasikan keberagaman pola konsumsi masyarakat mulai terlihat. Namun pada tahun 2021, skor PPH kembali mengalami penurunan menjadi 88,40. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi sehingga berdampak pada pendapatan masyarakat yang berpengaruh pada menurunnya daya beli masyarakat sehingga berimplikasi pada pola konsumsi masyarakat. Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Batang periode 2017-2021 selengkapnya tersaji dalam grafik berikut:

Gambar 1.12
 Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Batang Tahun 2017-2021

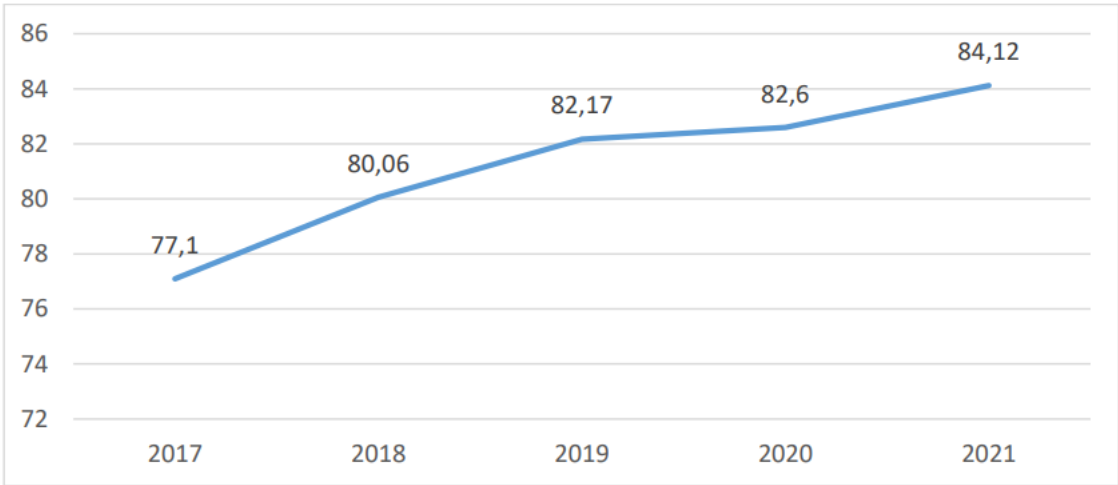


Sumber: Dispaperta Kabupaten Batang Tahun 2022

8. Akses Air Minum dan sanitasi

Air minum dan sanitasi merupakan salah satu kebutuhan dasar dalam kebutuhan manusia. Pelayanan terhadap akses air minum di Kabupaten Batang dalam periode lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari data cakupan layanan akses air minum yang terus meningkat dari tahun 2017-2021, dari 77,1% di tahun 2017 menjadi 84,12% di tahun 2021.

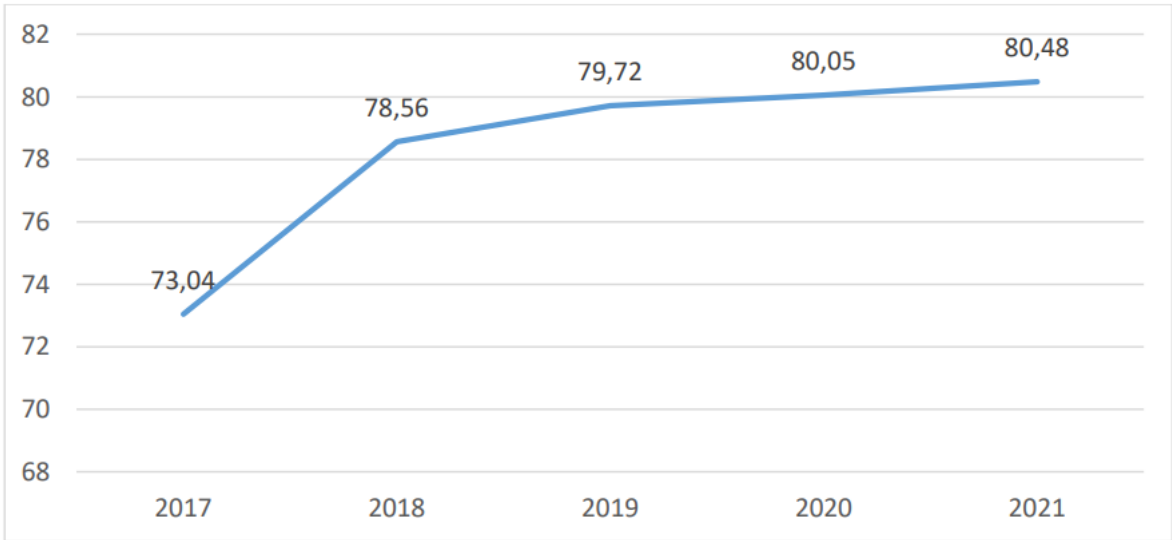
Gambar 1.13
Cakupan layanan akses air minum Kabupaten Batang (%)
Tahun 2017 -2021



Sumber: DPRKP Kabupaten Batang Tahun 2022

Demikian juga untuk cakupan layanan akses sanitasi, dalam periode 2017-2021 terus mengalami peningkatan dari 73,04% di tahun 2017 menjadi 80,48% di tahun 2021.

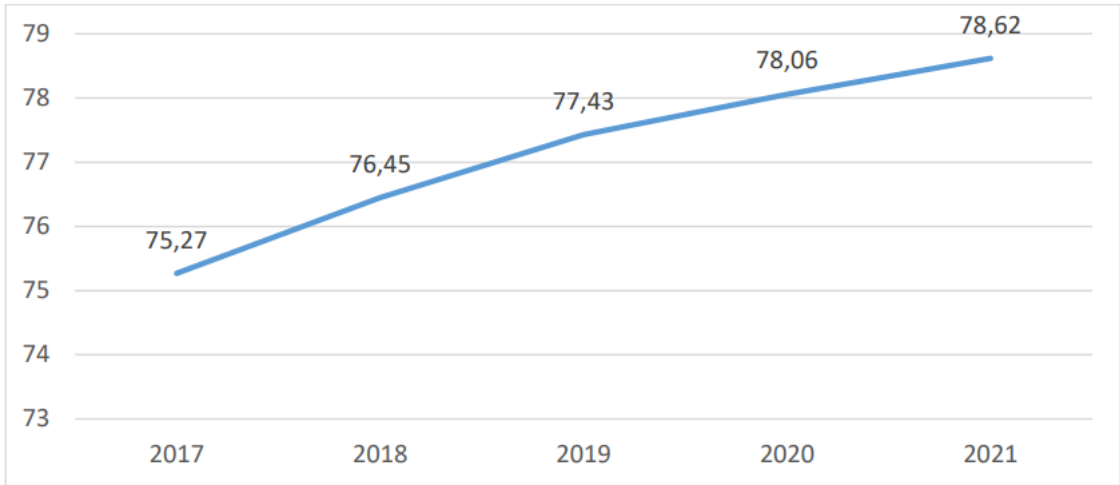
Gambar 1.14
Cakupan layanan akses sanitasi Kabupaten Batang
Tahun 2017-2021



Sumber: DPRKP Kabupaten Batang Tahun 2022

Persentase rumah layak huni mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebesar 75,27% menjadi 78,62% pada tahun 2021. Peningkatan ini antara lain disebabkan adanya upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas kawasan permukiman yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Batang melalui pemugaran rumah tidak layak huni.

Gambar 1.15
Persentase Rumah Layak Huni Kabupaten Batang (%)
Tahun 2017-2021



Sumber: DPRKP Kabupaten Batang Tahun 2022

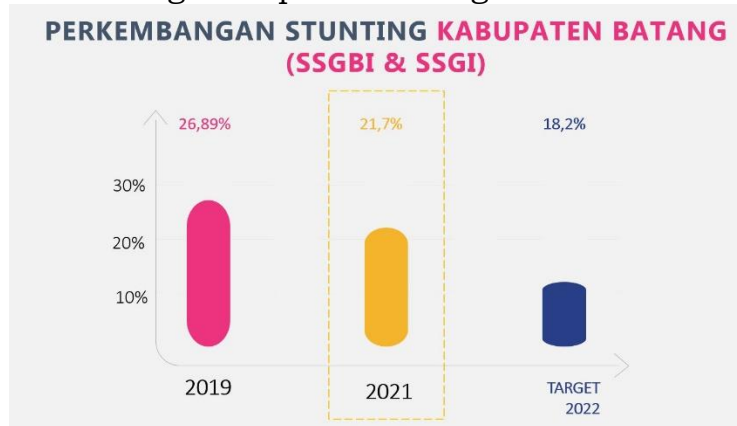
II. ANALISIS SITUASI STUNTING

A. KONDISI STUNTING KABUPATEN BATANG

Kondisi Stunting di Kabupaten Batang menunjukkan perbaikan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Berdasarkan data SSGBI dan SSGI, angka prevalensi stunting Kabupaten Batang mengalami penurunan sebesar 5,19 % dalam periode tahun 2019-2021, yaitu dari sebesar 26,89 % ditahun 2019 menjadi 21,7 % di tahun 2021.

Gambar 1.16

Perkembangan Stunting Kabupaten Batang 2019-2022



Sumber : SSGBI dan SSGI

Sedangkan berdasarkan data e-PPGBM (elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) angka prevalensi stunting Kabupaten Batang cenderung fluktuatif dalam periodei tahun 2019-2021, yaitu dari sebesar 10,27 % di tahun 2019, kemudian naik menjadi sebesar 16,71 % di tahun 2020. Namun, berbagai upaya dan intervensi telah dilakukan Pemkab Batang untuk menurunkan angka stunting sehingga pada tahun tahun 2022 dapat diturunkan menjadi 12,74 % (data pengukuran bulan Agustus, dengan cakupan input data sebesar 75,26 %).

Gambar 1.17

Perkembangan Stunting Kabupaten Batang 2017-2022



Sumber : e-PPGBM

Sementara jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, berdasarkan data SSGI tahun 2021 posisi Kabupaten Batang berada pada posisi 10 angka stunting tertinggi di Jawa Tengah.

Gambar 1.18
Angka Prevalensi Stunting Kabupaten Batang di Jawa Tengah



Menurut WHO, masalah kesehatan masyarakat dapat dianggap kronis bila prevalensi stunting lebih dari 20 persen. Sedangkan pada level nasional, Presiden Jokowi dalam arahannya menekankan bahwa target angka prevalensi *stunting* di tahun 2024 yakni di bawah 14 persen harus tercapai. Artinya, angka prevalensi stunting jika melihat dari kaca mata internasional, idealnya adalah berada dibawah 20 persen, namun jika dilihat dari arahan Presiden, idealnya adalah dibawah angka 14 persen. Sehingga dalam hal ini Kabupaten Batang menetapkan target prevalensi stunting dalam dokumen RKPD Kabupaten Batang tahun 2022 adalah sebesar 15,5 %.

ANALISIS PELAKSANAAN INTERVENSI SPESIFIK DI KABUPATEN BATANG

Proses terjadinya stunting dilalui dengan proses yang panjang, diawali dengan gagal tumbuh baik yang terjadi selama kehamilan maupun setelah lahir dua sampai tiga tahun pertama kehidupan. Gagal tumbuh tersebut berakibat terjadinya penurunan proporsi pada pertumbuhan tulang maupun jaringan lunak dalam tubuh. Stunting yang terjadi dalam periode kritis yaitu sejak dalam kandungan sampai dengan usia dua tahun, bila tidak dimanfaatkan dengan baik maka akan berdampak permanen terhadap perkembangan. Dalam penanganan stunting salah satu aspek yang paling penting untuk dipenuhi adalah pelaksanaan intervensi spesifik yang didalamnya terdapat tindakan-tindakan medis pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan, baik yang menyasar kepada Ibu Hamil maupun yang secara langsung menyasar kepada bayi.

Intervensi spesifik merupakan tindakan yang berorientasi pada penanganan jangka pendek, dimana hasilnya juga dapat dilihat secara langsung atau dalam jangka waktu yang pendek pula.

Hasil analisis situasi pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif di Kabupaten Batang, bahwa masih terdapat berbagai faktor yang menjadi perhatian dan secara rinci dapat dilihat pada analisis berikut.:

a) Cakupan Intervensi Layanan Spesifik

Beberapa cakupan layanan intervensi spesifik yang masih rendah dan perlu mendapatkan prioritas dalam penanganannya adalah:

1. Cakupan Remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD), disebabkan karena masa pandemi sehingga sekolah dilaksanakan secara daring, sementara pemberian TTD kepada remaja putri diberikan di sekolah. Hal ini juga berakibat pada tidak maksimalnya pendistribusian TTD untuk remaja putri yang putus sekolah, karena sasaran hanya terbatas pada remaja putri yang bersekolah. Selain hal tersebut, adanya pemikiran minum TTD jadi mual sehingga remaja putri enggan meminumnya.

Rekomendasi untuk upaya peningkatan cakupan layanan Remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD), diantaranya :

- 1) Pemberian tablet tambah darah bekerja sama dengan kader, programer gizi & bidan desa.
 - 2) Kampanye pil cantik pil pintar mengundang siswa perwakilan sekolah sebagai konselor sebaya
 - 3) Pembentukan posyandu remaja di tingkat desa (salah satu kegiatan pemberian TTD).
2. Cakupan Remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin), disebabkan belum ada kegiatan pemeriksaan Hemoglobin pada remaja putri karena keterbatasan alat untuk pemeriksaan Hb.
Rekomendasi untuk upaya peningkatan cakupan layanan Remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin), adalah pengadaan alat tes kadar Hemoglobin sesuai jumlah sasaran.
 3. Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri, disebabkan masih kurang masifnya sosialisasi gemar makan ikan bagi keluarga yang berisiko stunting yang dilaksanakan.

Rekomendasi untuk upaya peningkatan cakupan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri adalah optimalisasi sosialisasi gemar makan ikan (gemarikan) sebagai upaya langsung untuk meningkatkan konsumsi ikan, dan dilaksanakan secara rutin tiap tahun guna meningkatkan pengetahuan dan motivasi masyarakat.

4. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan, disebabkan terbatasnya SDM tenaga terlatih yang melakukan pelayanan, budaya masyarakat yang masih belum menganggap perlunya melakukan KB pasca persalinan, serta kurangnya motivasi di kalangan ibu paska persalinan.

Rekomendasi untuk upaya peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan adalah peningkatan kapasitas SDM terlatih dan berkolaborasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menginformasikan pentingnya KB pasca persalinan untuk mengatur jarak kehamilan.

b) Cakupan Intervensi Layanan Sensitif

Beberapa cakupan layanan intervensi sensitif yang masih rendah dan perlu mendapatkan prioritas dalam penanganannya adalah:

1. Keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan, disebabkan SDM yang ada tidak semua memiliki kompetensi dalam melakukan pendampingan, sehingga belum semua keluarga berisiko stunting mendapatkan pendampingan.

Rekomendasi untuk upaya peningkatan pendampingan Keluarga berisiko stunting adalah peningkatan kapasitas Tim Pendamping Keluarga.

2. Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi, disebabkan masih kurangnya pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan pekarangan untuk meningkatkan asupan gizi dan sekaligus peningkatan ekonomi keluarga, sehingga pemanfaatan sumber daya pekarangan belum optimal. Selain hal tersebut, faktor minat dan informasi teknologi yang diterima oleh masyarakat terkait optimalisasi pemanfaatan lahan untuk budidaya ikan juga masih sangat terbatas, sehingga pemanfaatan media lahan yg sempit belum banyak dilakukan oleh masyarakat.

Rekomendasi untuk upaya peningkatan manfaat sumber daya pekarangan adalah kolaborasi lintas sektor dalam melakukan sosialisasi dan pendampingan serta pelatihan pengelolaan pekarangan dan budidaya ikan secara intensif dengan lokus kegiatan pada desa yang memiliki jumlah yang signifikan terhadap keluarga beresiko stunting. Sehingga kebutuhan pangan akan daging ikan dapat secara mandiri diupayakan.

3. Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak, disebabkan penyediaan air minum baik melalui program Pamsimas maupun PDAM belum maksimal menjangkau seluruh masyarakat, serta belum ada pemeriksaan kualitas air secara rutin untuk mengetahui tingkat kelayakan air minum yang dikonsumsi masyarakat.

Rekomendasi untuk upaya peningkatan akses air minum layak adalah peningkatan layanan akses air minum layak melalui pelaksanaan program PAMSIMAS, penambahan jaringan PDAM serta Pemeriksaan kualitas air secara rutin.

4. Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak, disebabkan masih banyak masyarakat di perdesaan maupun perkotaan yang belum memiliki akses sanitasi (berupa IPAL maupun tangki septik individu), serta masih terbatasnya penyediaan layanan akses sanitasi yang diberikan.

Rekomendasi untuk upaya peningkatan akses sanitasi (air limbah domestik) layak adalah peningkatan layanan akses sanitasi layak melalui kolaborasi lintas sektor, baik dalam pelaksanaan kegiatan maupun dukungan pendanaan.

5. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur, disebabkan bantuan pangan diberikan berdasarkan data DTKS, sedangkan belum semua KPM terdaftar dalam DTKS.

Rekomendasi untuk upaya peningkatan pemberian variasi bantuan pangan selain beras dan telur kepada KPM adalah perbaikan manajemen data serta optimalisasi dana CSR, baik dalam pelaksanaan kegiatan maupun pemberian bantuan pangan.

Selain permasalahan tersebut, terdapat beberapa faktor penghambat lainnya yaitu:

- 1) Pemberian ASI eksklusif yang terhambat, terutama pada ibu bekerja;

- 2) Kebiasaan ayah perokok yang sulit dirubah;
- 3) Angka pernikahan dini cukup tinggi.

Hal ini dikarenakan usia remaja secara psikologis belum matang, sehingga belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kehamilan dan pola asuh anak yang baik dan benar. Selain itu, organ reproduksinya belum terbentuk sempurna, yang mana berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan menyebabkan keguguran.

- 4) Tingginya jumlah anak putus sekolah di Kabupaten Batang sehingga mengakibatkan kurangnya pengetahuan.

Permasalahan Stunting merupakan masalah yang multi sektoral, sehingga dalam dalam intervensinya melibatkan lintas sektor dan dibutuhkan sinergitas program yang mutlak. Oleh karena itu diperlukan peningkatan koordinasi dan perbaikan strategi penanggulangan stunting dalam mencapai target ZERO stunting Kabupaten Batang.

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN

Upaya menekan angka stunting di Kabupaten Batang selain dilakukan melalui intervensi spesifik dan intervensi sensitive dengan melibatkan kolaborasi lintas sektor yaitu unsur Pemerintah Daerah, swasta, masyarakat, akademisi dan media.

❖ Pemerintah Daerah

1. DP3AP2KB

- Pendampingan kepada Catin dengan memberikan materi pencegahan Stunting
- Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
- Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
- Pendampingan kepada Ibu dengan melakukan pemantauan IMB, KEK, HB, Tekanan Darah, Fundus Uteri, Cek Suhu dan Kie tentang 1000 HPK
- Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader)
- Audit Kasus stunting
- Penyediaan data informasi keluarga
- Pelaksanaan dan pengelolaan Program KKBPK di Kampung

2. DINKES

- Pemberian Tablet Tambah Darah
- Pemberian Makanan Tambahan

- Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
 - Pelayanan Kesehatan Balita
 - Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
 - Penyediaan Antropometri Kit
 - Jambanisasi
3. DISPERMADES
- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam peningkatan layanan Posyandu terintegrasi
 - Bantuan PMT
 - Pelatihan / Peningkatan kapasitas Kader Pembangunan Manusia
 - Penyusunan regulasi tentang peran Desa dan pengalokasian DD untuk percepatan penurunan stunting
4. DISLUTKANNAK
- Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan
 - Promosi dan gerakan Gemar makan ikan di masyarakat
5. DISPAPERTA
- Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal (Pemanfaatan kawasan rumah pekarangan lestari)
6. DISKOMINFO
- Penyediaan Data / Informasi dan publikasi stunting
7. BAPELITBANG
- Koordinasi dan evaluasi aksi konvergensi Stunting
 - Perbaikan sistem manajemen data pengumpulan dan pelaporan data konvergensi Stunting
8. DISDIKBUD
- PAUD HI dan kelas orang tua PAUD HI
 - Pengadaan / perbaikan tempat cuci tangan
9. DPRKP/DPUPR
- Penyediaan air bersih
 - Penyediaan sanitasi

❖ **Swasta / Pelaku Usaha**

1. CSR (dalam bentuk pemberian makanan tambahan dan sembako kepada keluarga yang memiliki balita Stunting);

2. Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS), melalui pemberian makanan tambahan untuk 18 anak stunting selama 3 bulan;
 3. Dukungan perusahaan untuk edukasi pemenuhan gizi bagi karyawan perempuan guna pencegahan stunting
- Sektor Swasta yang terlibat : Forum CSR, Bank Jateng, BKK, UPZ dan BPI

❖ Masyarakat / Desa

1. Desa
 - Pelatihan kesehatan ibu dan anak
 - penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan makanan pendamping air susu ibu;
 - pemberian makanan tambahan
 - Pengadaan alat ukur tinggi badan untuk bayi
 - penyediaan air bersih dan sanitasi
 - perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan
 - pendidikan tentang pengasuhan anak
2. PKK
 - Pemberian Antropometri Kit
 - Pelatihan pengukuran badan balita kepada Kader Posyandu / KPM
 - Pemberian Makanan Tambahan

❖ Akademisi

Keterlibatan akademisi diwujudkan melalui keikutsertaan Perguruan Tinggi dalam upaya penurunan stunting diantaranya penempatan KKN Tematik di Desa lokus stunting dan lokus Kemiskinan Ekstrim.

❖ Media

Peran media dalam percepatan penurunan stunting adalah sebagai sumber informasi untuk para pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi terbaru dalam upaya pencegahan *stunting*. Informasi terbaru yang disajikan dapat digunakan sebagai sumber rujukan, untuk mengetahui sejauh mana upaya pencegahan *stunting* yang telah dilaksanakan.

❖ Inovasi

Upaya penanganan stunting juga diwujudkan melalui inovasi-inovasi penurunan stunting diantaranya :

- **JAHE CANTING (Remaja hebat cegah stunting)**

Meningkatkan kesehatan remaja melalui posyandu Remaja.

- **D'Basinem (Desa Binaan Asi Thok Nem wulan)**

Membangun paradigma masyarakat utk saling memotivasi dalam menu gizi seimbang melalui :

- Edukasi Asi eksklusif, sekaligus media monev kesadaran memberi Asi eksklusif kepada masyarakat
- Seminggu sekali makan bersama ditempat posyandu, atau sesuai waktu & tempat kesepakatan warga
- Memasak menu gizi seimbang untuk giat makan bersama balita
- Giat makan bersama balita sambil bermain
- Brain storming (Diskusi)

Dengan melibatkan unsur: Muspika, Petugas Gizi Puskesmas, Petugas Promkes Puskesmas, Bidan desa, Kades & perangkat, PKK & Kader, RT & RW, Ibu menyusui, Ibu yg mempunyai anak balita.

❖ **Anggaran**

Dukungan anggaran untuk penurunan Stunting di Kabupaten Batang tahun 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut :

OPD	ANGGARAN 2022	ANGGARAN 2023
BAPELITBANG	66.980.000	70.000.000
DINAS KB	5.012.484.800	5.012.484.800
DINAS KESEHATAN	1.615.403.500	293.960.000
DISPAPERTA	-	150.000.000
DINAS KOMINFO	4.000.000	4.000.000
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	430.743.700	434.744.900
DINAS PERIKANAN	25.000.000	60.000.000
DINAS PU / CIPTA KARYA	9.675.080.000	10.602.155.000
DANA DESA	30.000.000.000	25.000.000.000
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	150.000.000	2.075.000.000
TOTAL	46.829.692.000	43.702.344.700

PENETAPAN LOKUS STUNTING 2023

Berdasarkan data penimbangan serempak tahun 2021 dan analisis situasi grafik prevalensi diatas masih terdapat desa dengan prevalensi stunting yang cukup tinggi, sehingga perlu ditetapkan menjadi lokus stunting. Desa lokus stunting tahun 2023 ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 441/169/2022 tanggal 26 April 2022, sebagai berikut :

DAFTAR DESA / KELURAHAN LOKASI PRIORITAS PENCEGAHAN
DAN PENANGANAN STUNTING KAB. BATANG TAHUN 2023

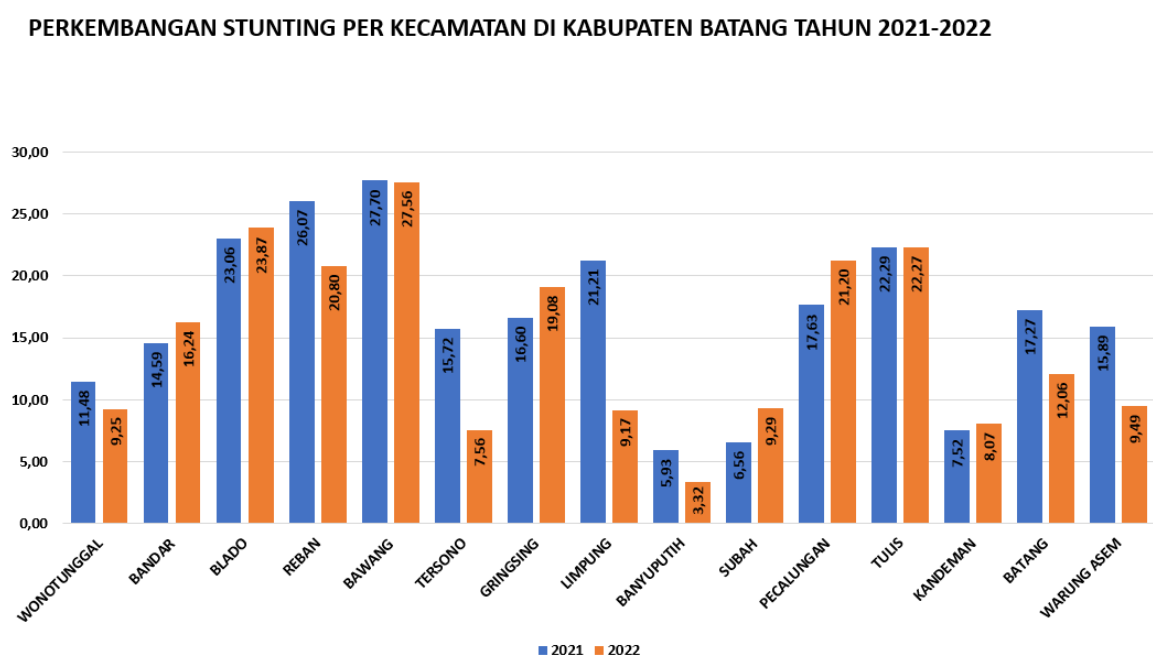
NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	DESA	KELURAHAN
1	Bandar	Bandar I	Tumbrep	
2	Bawang	Bawang	Surjo	
3	Pecalungan	Pecalungan	Pretek	
4	Batang	Batang IV		Kasepuhan
5	Batang	Batang II		Karangasem Selatan
6	Batang	Batang I		Proyonanggan Utara
7	Bandar	Bandar I	Wonokerto	
8	Blado	Blado II	Gerlang	
9	Blado	Blado I	Keteleng	
10	Blado	Blado II	Pesantren	
11	Blado	Blado II	Kambangan	
12	Blado	Baldo I	Cokro	
13	Reban	Reban	Mojotengah	
14	Reban	Reban	Tambakboyoy	
15	Reban	Reban	Adinuso	
16	Bawang	Bawang	Deles	
17	Bawang	Bawang	Sangubanyu	
18	Bawang	Bawang	Sidoharjo	

19	Tulis	Tulis	Kebumen	
20	Warungasem	Warungasem	Gapuro	
21	Warungasem	Warungasem	Sawahjoho	
22	Pecalungan	Pecalungan	Gumawang	
23	Bandar	Bandar I	Kluwih	
24	Tulis	Tulis	Tulis	
25	Batang	Batang I		Proyonanggan Tengah

B. ANALISIS SITUASI STUNTING DI TINGKAT KECAMATAN

Persebaran angka prevalensi stunting per Kecamatan di Kabupaten Batang berdasarkan data hasil penimbangan serentak di bulan Pebruari tahun 2022 di 15 (lima belas) Kecamatan di Kabupaten Batang menunjukkan bahwa angka stunting tertinggi terdapat di Kecamatan Bawang sebesar 27,56 persen. Walaupun angka stunting tersebut turun jika dibandingkan tahun sebelumnya, namun penurunannya belum begitu signifikan. Sedangkan Kecamatan dengan angka stunting terendah adalah Kecamatan Banyuputih yaitu sebesar 3,32 persen. Angka tersebut juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,93 persen. Dari 15 kecamatan di Kabupaten Batang, sebanyak 9 kecamatan dengan capaian penurunan angka stunting yang lebih baik atau menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu Kecamatan Wonotunggal, Kecamatan Reban, Kecamatan Bawang, Kecamatan Tersono, Kecamatan Limpung, Kecamatan Banyuputih, Kecamatan Tulis, Kecamatan Batang dan Kecamatan warungasem. Sedangkan 6 kecamatan lainnya memiliki capaian angka prevalensi stunting yang lebih tinggi atau meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu Kecamatan Bandar, Kecamatan Blado, Kecamatan Gringsing, Kecamatan Subah, Kecamatan Kandeman dan Kecamatan Pecalungan. Jika diperhatikan, persebaran kecamatan dengan angka stunting relative tinggi di Kabupaten Batang, terdapat pada wilayah selatan Kabupaten Batang yang secara geografis merupakan daerah pegunungan. Kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah tersebut, dimana wilayah Kecamatan Bandar,

Kecamatan Blado, Kecamatan Bawang merupakan kecamatan yang menjadi lokus Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim. Demikian juga di wilayah utara Kabupaten Batang yang merupakan daerah pantai, juga terdapat 1 Kecamatan dengan peningkatan angka stunting yaitu Kecamatan Kandeman juga merupakan kecamatan lokus Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim. Hal tersebut menunjukkan adanya korelasi antara kondisi kemiskinan dengan peningkatan kasus stunting di Kabupaten Batang. Persebaran angka stunting di 15 kecamatan di Kabupaten Batang selengkapnya sebagaimana digambarkan dalam grafik berikut.

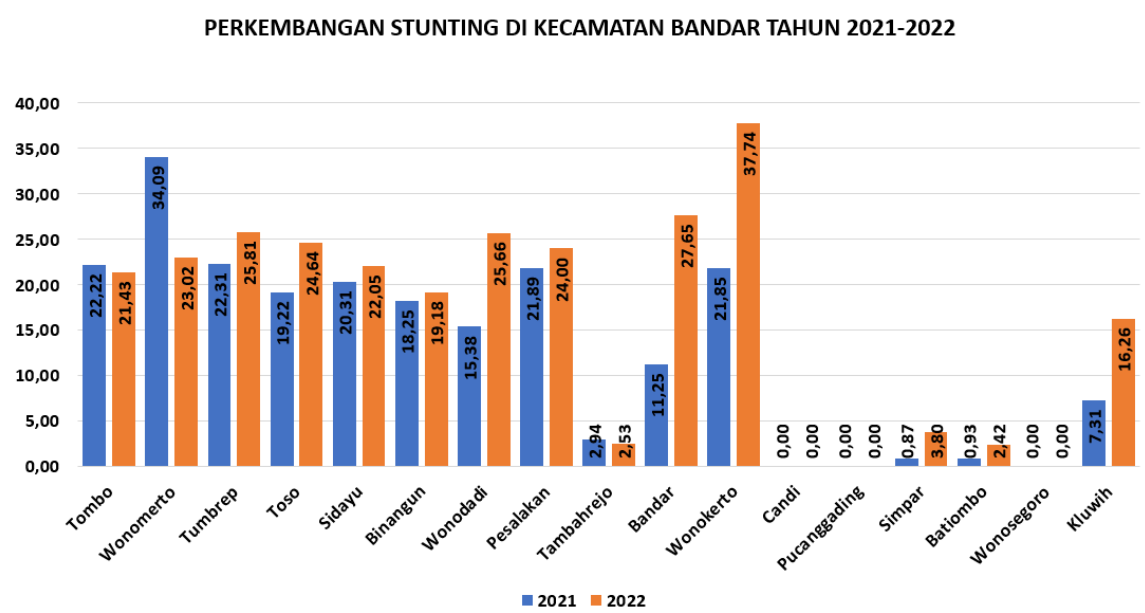


Secara lebih mendetail, analisis situasi kondisi stunting pada masing-masing Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Bandar

Kecamatan Bandar dengan luas wilayah 7.936,76 ha terdiri dari 17 desa dengan jumlah penduduk sebesar 72.451 jiwa. Berdasarkan data e-PPGBM bulan Pebruari tahun 2022 Kecamatan Bandar memiliki angka prevalensi stunting sebesar 16,24 persen, dengan prevalensi stunting tertinggi di Desa Wonokerto sebesar 37,74 persen, sedangkan prevalensi terendah berada didesa Batiombo dengan prevalensi stunting sebesar 2,42 persen. Angka prevalensi stunting di Kecamatan Bandar mengalami kenaikan sebesar 1,65 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berarti upaya penurunan stunting di Kecamatan Bandar perlu upaya lebih keras lagi. Dari 17 desa di Kecamatan Bandar terdapat 11 desa yang perlu mendapatkan perhatian dalam percepatan penurunan stunting kedepan karena terdapat

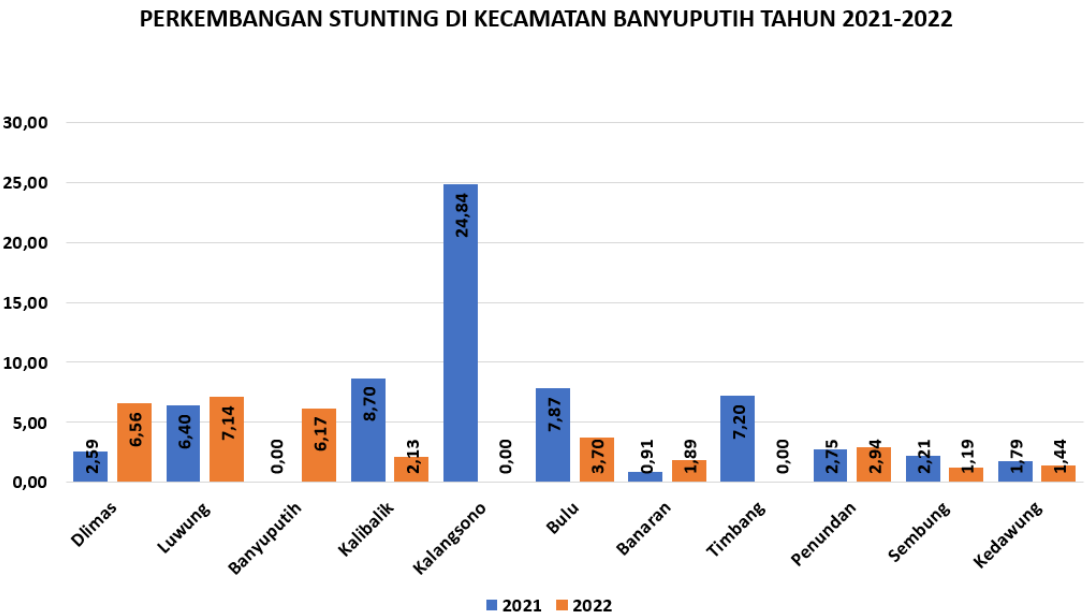
peningkatan angka stunting jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu desa Tumbrep, Toso, Sedayu, Binangun, Wonodadi, Pesalakan, Bandar, Wonokerto, Simpar, Batiombo dan Kluwih. Sementara terdapat 3 desa yang tidak melaporkan angka prevalensi stunting yaitu desa Candi, Pucanggading dan Wonosegoro. Beberapa layanan esensial yang perlu mendapatkan prioritas di desa tersebut adalah pemberian TTD pada remaja putri, pemeriksaan kasus anemia untuk remaja putri, promosi makan ikan kepada keluarga beresiko stunting, layanan KB pasca persalinan, pemanfaatan pekarangan pada keluarga beresiko stunting, masih minimnya keluarga beresiko stunting yang mendapatkan pendampingan serta belum optimalnya akses air minum dan sanitasi layak.



2. Kecamatan Banyuputih

Kecamatan Banyuputih dengan luas wilayah 4.242,36 ha terdiri dari 11 desa dengan jumlah penduduk sebesar 37.057 jiwa. Berdasarkan data e-PPGBM bulan Pebruari tahun 2022, Kecamatan Banyuputih memiliki angka prevalensi stunting sebesar 3,32 persen, dengan prevalensi stunting tertinggi di Desa Dlimas sebesar 6,56 persen, sedangkan prevalensi terendah berada didesa Timbang dan desa Kalangsono dengan prevalensi stunting sebesar 0 persen, dengan rata-rata cakupan 29 layanan esensial sebesar 59,10 persen. Angka prevalensi stunting di Kecamatan Banyuputih mengalami penurunan sebesar 2,59 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berarti upaya penurunan stunting di Kecamatan Banyuputih cukup berhasil. Dari 11

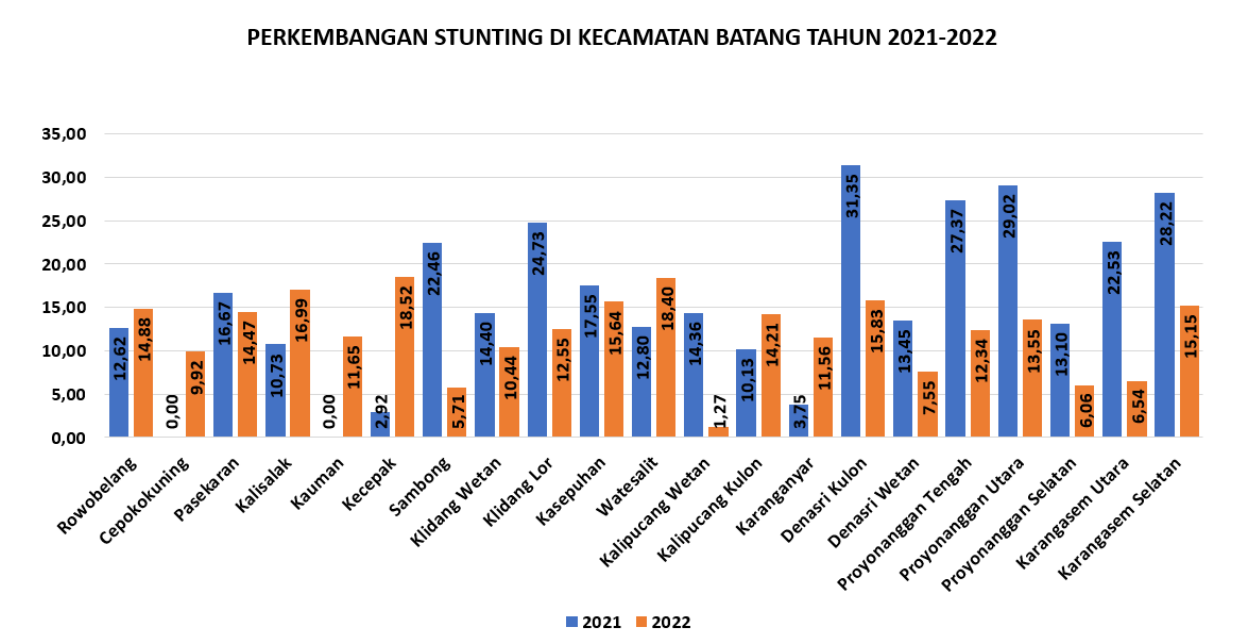
desa di Kecamatan Banyuputih terdapat 4 desa/kelurahan yang perlu mendapatkan perhatian dalam percepatan penurunan stunting kedepan karena terdapat peningkatan angka stunting jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu Dlimas, Luwung, Banyuputih, Banaran dan Penundan. Sementara terdapat 1 desa yang tidak melaporkan prevalensi stunting yaitu desa Kalangsono. Beberapa layanan esensial yang perlu mendapatkan prioritas di desa tersebut adalah pemeriksaan kasus anemia untuk remaja putri, promosi makan ikan kepada keluarga beresiko stunting, layanan KB pasca persalinan, pemanfaatan pekarangan pada keluarga beresiko stunting, masih minimnya keluarga beresiko stunting yang mendapatkan pendampingan serta belum optimalnya akses air minum dan sanitasi layak.



3. Kecamatan Batang

Kecamatan Batang dengan luas wilayah 3.931,44 ha terdiri dari 21 desa & kelurahan dengan jumlah penduduk sebesar 135.108 jiwa. Berdasarkan data e-PPGBM bulan Pebruari tahun 2022, Kecamatan Batang memiliki angka prevalensi stunting sebesar 12,06 persen, dengan prevalensi stunting tertinggi di Desa Kecepak sebesar 18,52 persen, sedangkan prevalensi terendah berada di desa Kalipucang Wetan dengan prevalensi stunting sebesar 1,27 persen dengan rata-rata cakupan 29 layanan esensial sebesar 57,51 persen. Angka prevalensi stunting di Kecamatan Batang mengalami penurunan sebesar 5,21 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berarti upaya penurunan stunting di Kecamatan Batang cukup berhasil. Dari 21 Desa dan

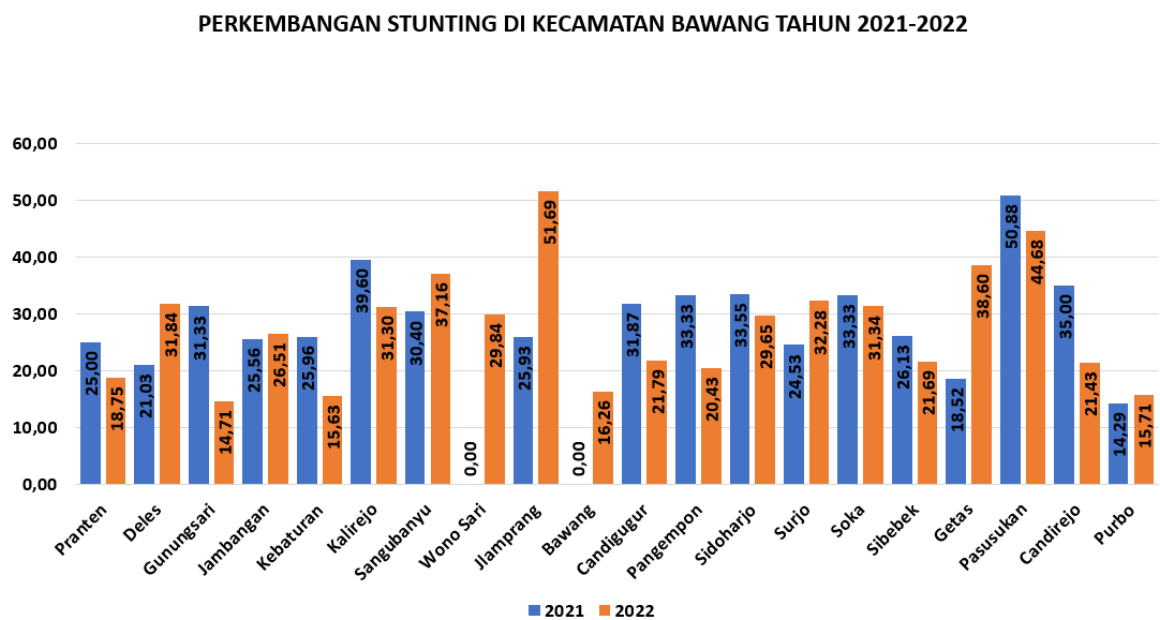
kelurahan di Kecamatan Batang terdapat 8 desa/kelurahan yang perlu mendapatkan perhatian dalam percepatan penurunan stunting kedepan karena terdapat peningkatan angka stunting jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu Rowobelang , Cepokokuning , Kalisalak, Kauman, Kecepak, Watesalit, Kalipucang Kulon dan Karanganyar. Beberapa layanan esensial yang perlu mendapatkan prioritas di desa tersebut adalah pemeriksaan kasus anemia untuk remaja putri, promosi makan ikan kepada keluarga beresiko stunting, layanan KB pasca persalinan, pemanfaatan pekarangan pada keluarga beresiko stunting, masih minimnya keluarga beresiko stunting yang mendapatkan pendampingan serta belum optimalnya akses air minum dan sanitasi layak.



4. Kecamatan Bawang

Kecamatan Bawang dengan luas wilayah 7.696,82 ha terdiri dari 20 desa dengan jumlah penduduk sebesar 56.094 jiwa. Berdasarkan data e-PPGBM bulan Pebruari tahun 2022, Kecamatan Bawang memiliki angka prevalensi stunting sebesar 27,56 persen, dengan prevalensi stunting tertinggi di Desa Jlamprang sebesar 51,69 persen, sedangkan prevalensi terendah berada di desa Gunungsari dengan prevalensi stunting sebesar 14,71 persen. Sedangkan rata-rata cakupan 29 layanan esensial sebesar 45,36 persen. Angka prevalensi stunting di Kecamatan Bawang mengalami penurunan sebesar 0,14 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berarti kedepan upaya

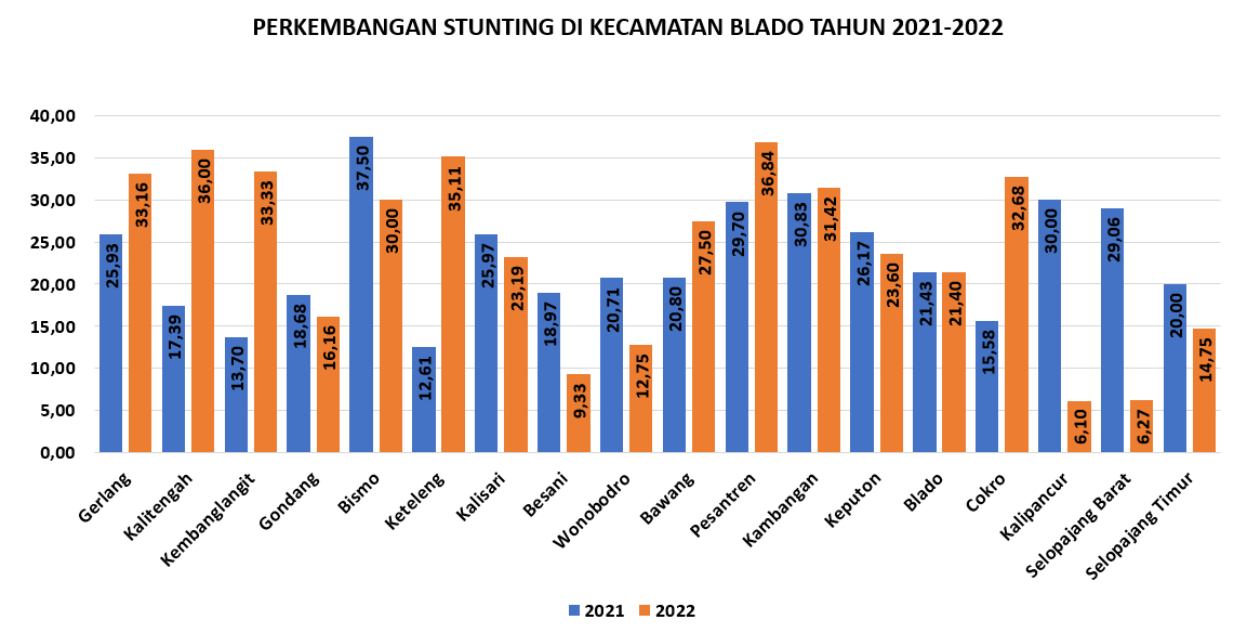
penurunan stunting harus lebih keras lagi. Kecamatan Bawang merupakan kecamatan dengan angka prevalensi stunting tertinggi di Kabupaten Batang, dan terdapat 2 desa di Kecamatan Bawang yang perlu mendapatkan perhatian dalam percepatan penurunan stunting kedepan karena terdapat peningkatan angka stunting yang cukup signifikan yaitu sebesar 29,84 persen di desa Wonosari dan desa Bawang dengan peningkatan sebesar 16,26 persen. Beberapa layanan esensial yang perlu mendapatkan prioritas di desa tersebut adalah pemberian TTD untuk remaja putri, pemeriksaan kasus anemia untuk remaja putri, pemberian MP-ASI yang belum optimal, tambahan asupan gizi bagi balita gizi kurang, masih minimnya keluarga beresiko stunting yang mendapatkan pendampingan serta belum optimalnya akses air minum dan sanitasi layak.



5. Kecamatan Blado

Kecamatan Blado dengan luas wilayah 9.644,78 ha terdiri dari 18 desa dengan jumlah penduduk sebesar 46.142 jiwa. Berdasarkan data e-PPGBM bulan Pebruari tahun 2022, Kecamatan Blado memiliki angka prevalensi stunting sebesar 23,87 persen, dengan prevalensi stunting tertinggi di Desa Pesantren sebesar 36,84 persen, sedangkan prevalensi terendah berada di desa

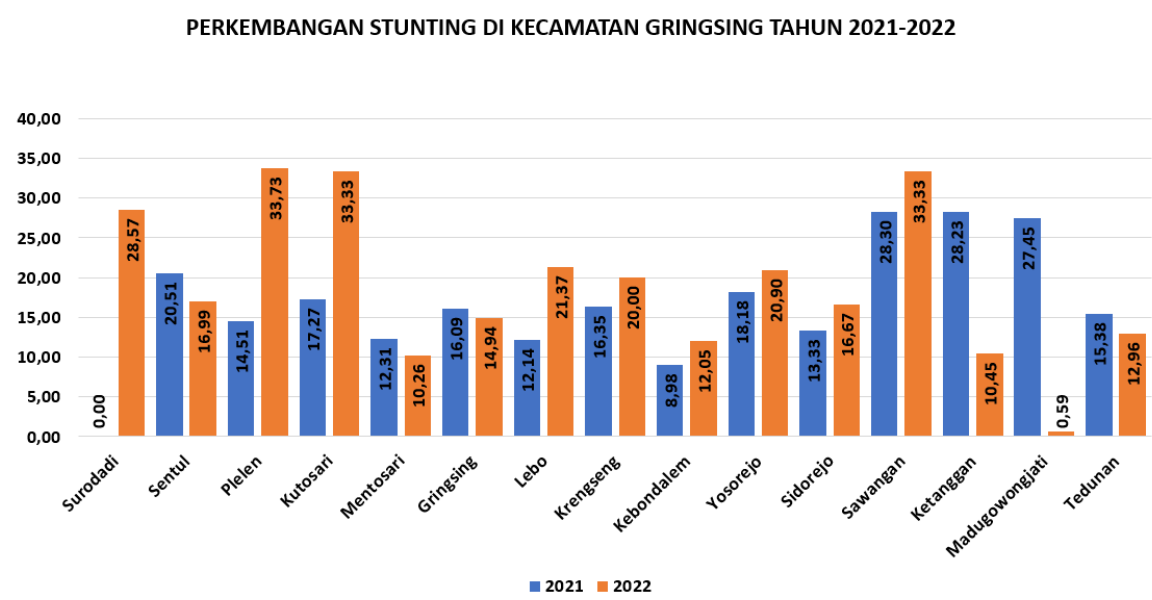
Kalipancur dengan prevalensi stunting sebesar 6,10 persen. Sedangkan rata-rata cakupan 29 layanan esensial sebesar 58,68 persen. Angka prevalensi stunting di Kecamatan Blado mengalami kenaikan sebesar 0,81 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berarti kedepan upaya penurunan stunting harus lebih keras lagi. Dari 18 desa di Kecamatan Blado terdapat 7 desa yang angka prevalensi stuntingnya mengalami kenaikan cukup tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu desa Gerlang, Kalitengah, Kembanglangit, Keteleng, Bawang, Pesantren, Kambangan dan Cokro. Beberapa layanan esensial yang perlu mendapatkan prioritas di desa tersebut adalah pemberian TTD untuk remaja putri, pemeriksaan kasus anemia untuk remaja putri, pemberian MP-ASI yang belum optimal, tambahan asupan gizi bagi balita gizi kurang, masih minimnya keluarga beresiko stunting yang mendapatkan pendampingan serta masih permasalahan Buang Air Besar Sembarangan serta belum optimalnya layanan akses air minum dan sanitasi.



6. Kecamatan Gringsing

Kecamatan Gringsing dengan luas wilayah 7.989,29 ha terdiri dari 15 desa dengan jumlah penduduk sebesar 63.664 jiwa. Berdasarkan data e-PPGBM bulan Pebruari tahun 2022, Kecamatan Gringsing memiliki angka prevalensi stunting sebesar 19,08 persen, dengan prevalensi stunting tertinggi di Desa Plelen sebesar 33,73 persen, sedangkan prevalensi terendah berada di desa Madugowongjati dengan prevalensi stunting sebesar 0,59 persen. Sedangkan rata-rata cakupan 29 layanan esensial sebesar 49,35 persen.

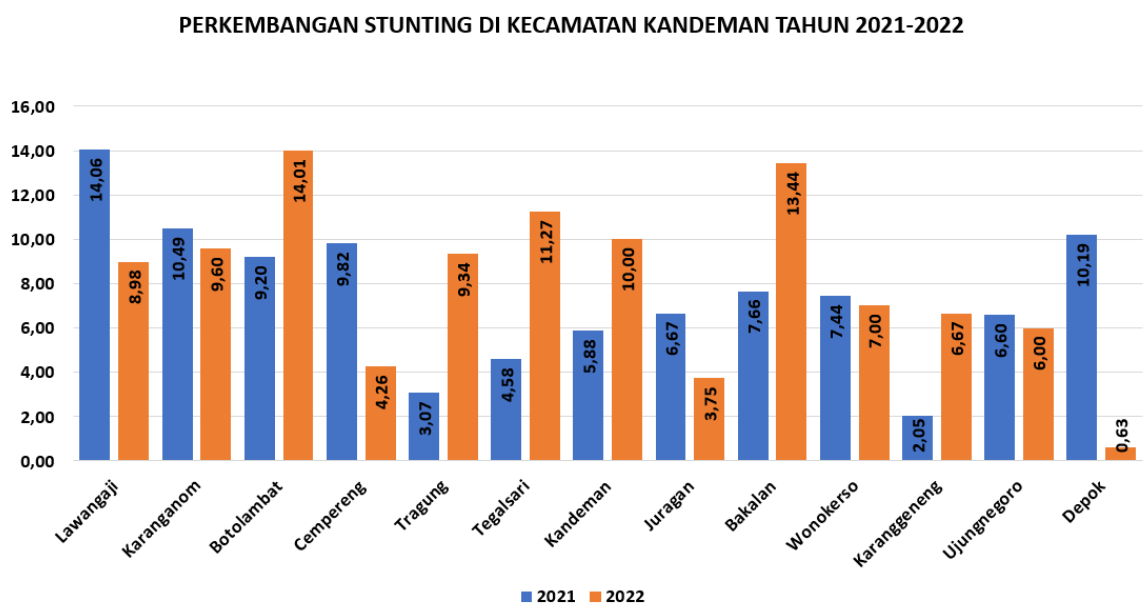
Angka prevalensi stunting di Kecamatan Gringsing mengalami kenaikan sebesar 2,48 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berarti kedepan upaya penurunan stunting harus lebih baik lagi. Dari 15 desa di Kecamatan Gringsing terdapat 9 desa yang angka prevalensi stuntingnya mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu desa Surodadi, Plelen, Kutosari, Lebo, Krengseng, Kebondalem, Yosorejo, Sidorejo dan Sawangan. Desa Surodadi mengalami kenaikan angka stunting yang signifikan yaitu sebesar 28,57 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Beberapa layanan esensial yang perlu mendapatkan prioritas di desa tersebut adalah pemberian TTD untuk remaja putri, pemeriksaan kasus anemia untuk remaja putri, pemberian MP-ASI yang belum optimal, tambahan asupan gizi bagi balita gizi kurang, masih minimnya keluarga beresiko stunting yang mendapatkan pendampingan serta layanan KB pasca persalinan serta belum semua rumah tangga mendapatkan akses air minum layak.



7. Kecamatan Kandeman

Kecamatan Kandeman dengan luas wilayah 4.060,20 ha terdiri dari 13 desa dengan jumlah penduduk sebesar 55.515 jiwa. Berdasarkan data e-PPGBM bulan Pebruari tahun 2022, Kecamatan Kandeman memiliki angka prevalensi stunting sebesar 8,07 persen, dengan prevalensi stunting tertinggi di desa Botolambat sebesar 14,01 persen, sedangkan prevalensi terendah berada di desa Depok dengan prevalensi stunting sebesar 0,63 persen. Sedangkan rata-rata cakupan 29 layanan esensial sebesar 58,95 persen. Angka prevalensi stunting di Kecamatan Kandeman mengalami kenaikan

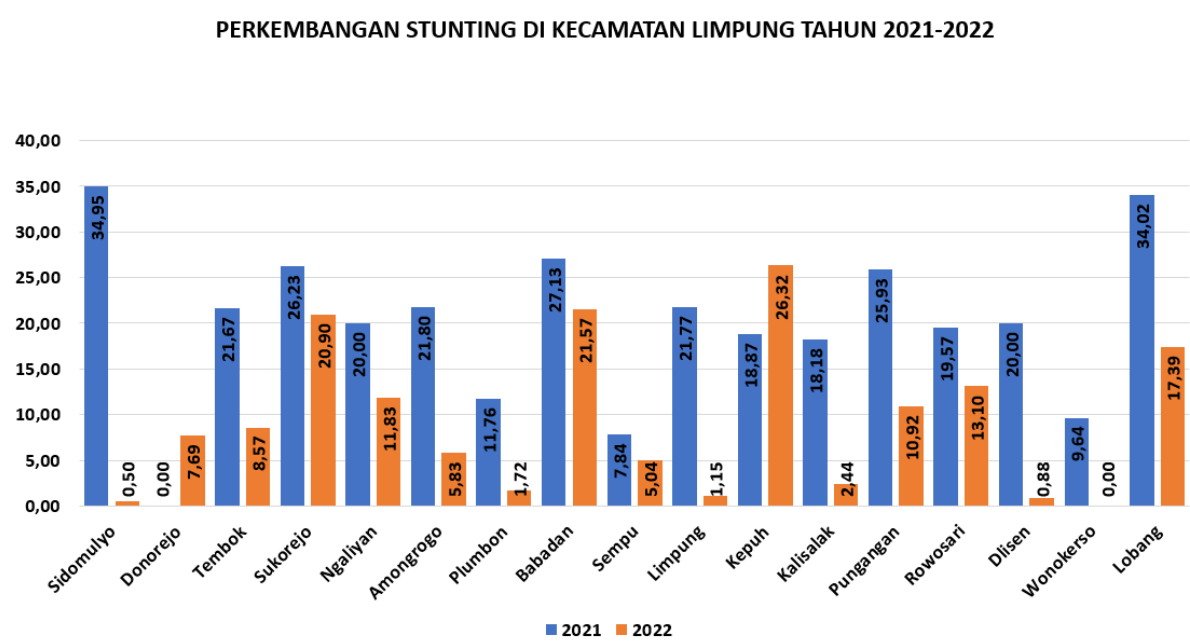
sebesar 0,55 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berarti kedepan upaya penurunan stunting harus lebih baik lagi. Dari 13 desa di Kecamatan Kandeman terdapat 6 desa yang angka prevalensi stuntingnya mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu desa Botolambat, Tragung, Tegalsari, Kandeman, Bakalan dan Karanggeneng. Beberapa layanan esensial yang perlu mendapatkan prioritas di desa tersebut adalah pemeriksaan kasus anemia untuk remaja putri, pemberian MP-ASI yang belum optimal, tambahan asupan gizi bagi balita gizi kurang, masih minimnya keluarga beresiko stunting yang mendapatkan pendampingan, layanan KB pasca persalinan, pemanfaatan pekarangan bagi keluarga beresiko stunting serta belum semua rumah tangga dapat mengakses air minum layak.



8. Kecamatan Limpung

Kecamatan Limpung dengan luas wilayah 3.271,72 ha terdiri dari 17 desa dengan jumlah penduduk sebesar 44.360 jiwa. Berdasarkan data e-PPGBM bulan Pebruari tahun 2022, Kecamatan Limpung memiliki angka prevalensi stunting sebesar 9,17 persen, dengan prevalensi stunting tertinggi di desa Kepuh sebesar 26,32 persen, sedangkan prevalensi terendah berada di desa Wonokerso dengan prevalensi stunting sebesar 0 persen. Sedangkan rata-rata cakupan 29 layanan esensial sebesar 59,92 persen. Angka prevalensi stunting di Kecamatan Limpung mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 12,04 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun

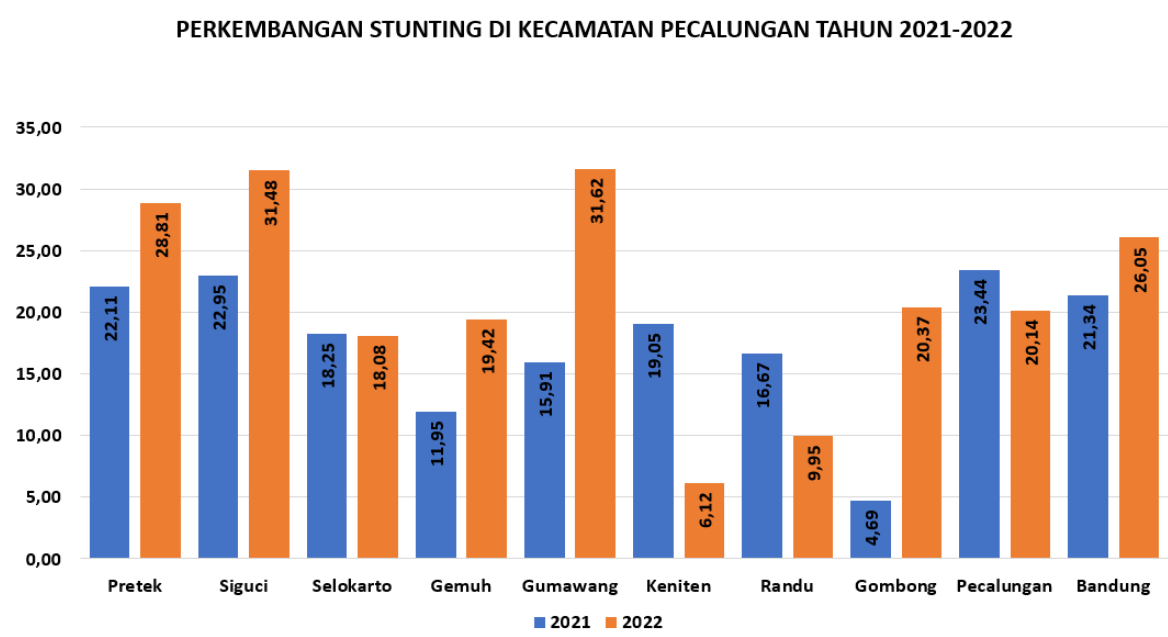
demikian, dari 17 desa di Kecamatan Limpung masih terdapat 1 desa yang angka prevalensi stuntingnya mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu desa Kepuh. Beberapa layanan esensial yang perlu menjadi prioritas karena belum dilaksanakan di Kecamatan Limpung adalah pemberian TTD untuk remaja putri, promosi gemar makan ikan untuk keluarga beresiko stunting serta masih minimnya keluarga beresiko stunting yang mendapatkan pendampingan dan pemanfaatan pekarangan, serta masih terdapat desa yang belum mendapat akses air minum layak.



9. Kecamatan Pecalungan

Kecamatan Pecalungan dengan luas wilayah 3.342,14 ha terdiri dari 10 desa dengan jumlah penduduk sebesar 32.729 jiwa. Berdasarkan data e-PPGBM bulan Pebruari tahun 2022, Kecamatan Pecalungan memiliki angka prevalensi stunting sebesar 21,20 persen, dengan prevalensi stunting tertinggi di desa Gumawang sebesar 31,62 persen, sedangkan prevalensi terendah berada di desa Keniten dengan prevalensi stunting sebesar 6,12 persen. Sedangkan rata-rata cakupan 29 layanan esensial sebesar 53,77 persen. Angka prevalensi stunting di Kecamatan Pecalungan mengalami kenaikan yang sebesar 3,57 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari 10 desa di Kecamatan Pecalungan terdapat 6 desa yang angka prevalensi stuntingnya mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu desa Pretek, Siguci, Gemuh, Gumawang, Gombong dan

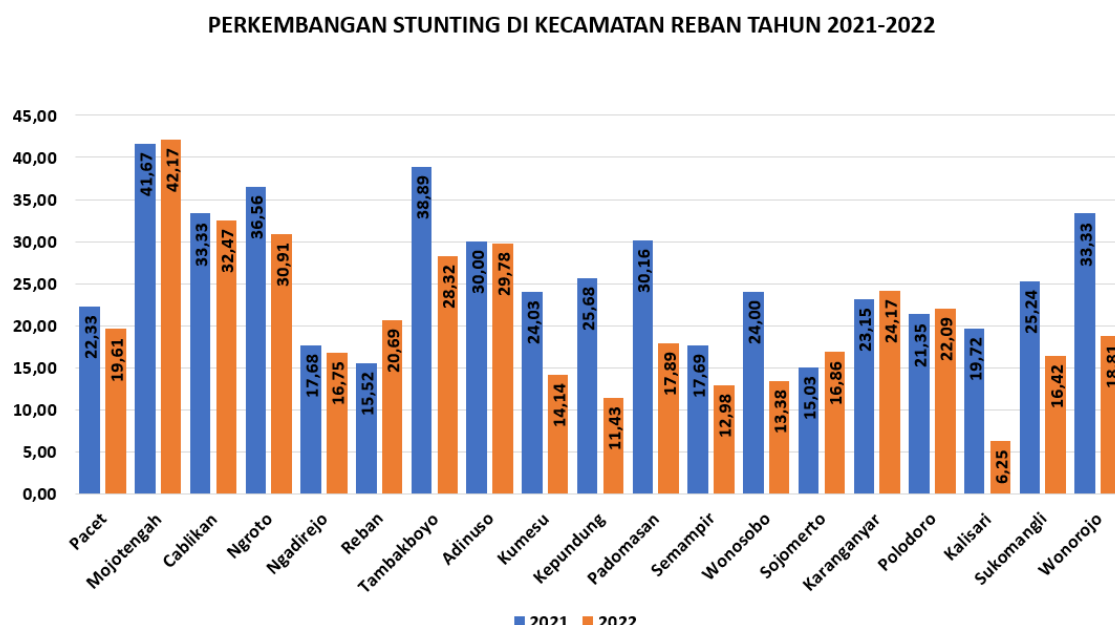
Bandung. Beberapa layanan esensial yang perlu menjadi prioritas adalah pemberian TTD untuk remaja putri, pemeriksaan kasus anemia untuk remaja putri, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita, promosi gemar makan ikan untuk keluarga beresiko stunting, masih minimnya keluarga beresiko stunting yang mendapatkan pendampingan, serta masih terdapat rumah tangga yang belum mendapatkan akses air minum dan sanitasi yang layak.



10. Kecamatan Reban

Kecamatan Reban dengan luas wilayah 6.947,07 ha terdiri dari 19 desa dengan jumlah penduduk sebesar 40.760 jiwa. Berdasarkan data e-PPGBM bulan Pebruari tahun 2022, Kecamatan Reban memiliki angka prevalensi stunting sebesar 20,80 persen, dengan prevalensi stunting tertinggi di desa Mojotengah sebesar 42,17 persen, sedangkan prevalensi terendah berada di desa Kalisari dengan prevalensi stunting sebesar 6,25 persen. Sedangkan rata-rata cakupan 29 layanan esensial sebesar 55,09 persen. Angka prevalensi stunting di Kecamatan Reban mengalami penurunan sebesar 5,27 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang artinya upaya penurunan stunting di Kecamatan Reban cukup berhasil. Namun demikian, dari 19 desa di Kecamatan Reban terdapat 5 desa yang angka prevalensi stuntingnya mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu Mojotengah, Reban, Sojomerto, Karanganyar dan Polodoro. Beberapa layanan

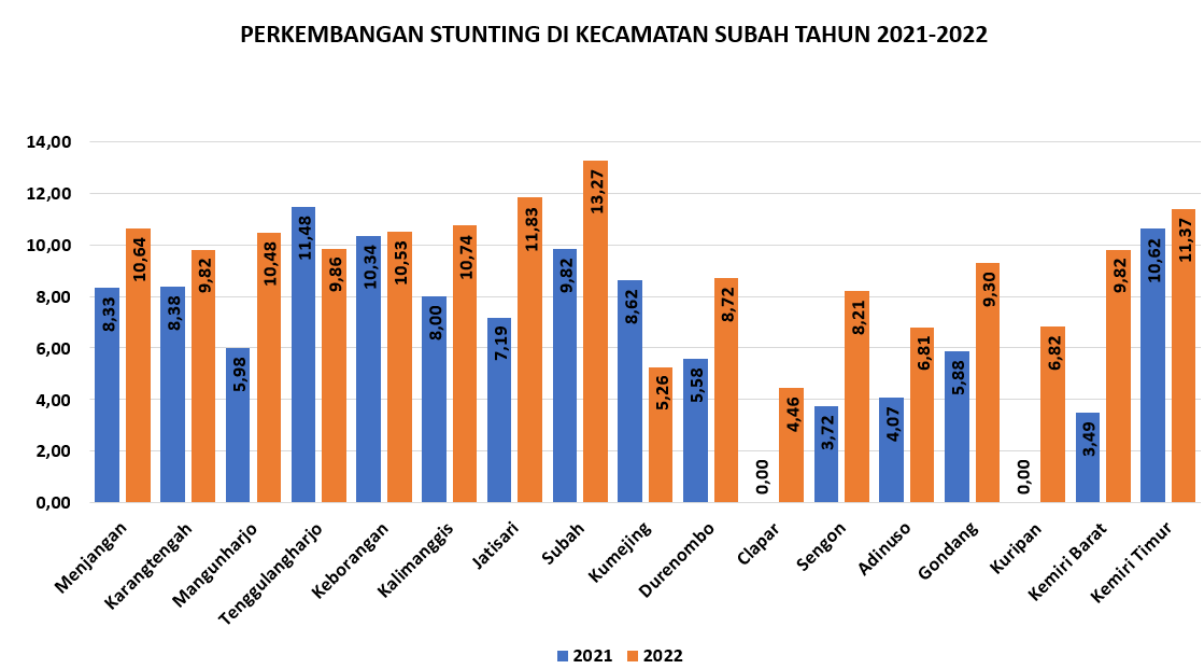
esensial yang perlu menjadi prioritas adalah pemberian TTD untuk remaja putri, pemeriksaan kasus anemia untuk remaja putri, promosi gemar makan ikan untuk keluarga beresiko stunting, pelayanan KB pasca persalinan, masih minimnya keluarga beresiko stunting yang mendapatkan pendampingan, belum semua rumah tangga mendapatkan akses air minum layak serta masih banyaknya rumah tangga yang belum memiliki akses sanitasi layak.



11. Kecamatan Subah

Kecamatan Subah dengan luas wilayah 9.166,67 ha terdiri dari 17 desa dengan jumlah penduduk sebesar 53.581 jiwa. Berdasarkan data e-PPGBM bulan Pebruari tahun 2022, Kecamatan Subah memiliki angka prevalensi stunting sebesar 9,29 persen, dengan prevalensi stunting tertinggi di desa Subah sebesar 13,27 persen, sedangkan prevalensi terendah berada di desa Clapar dengan prevalensi stunting sebesar 4,46 persen. Sedangkan rata-rata cakupan 29 layanan esensial sebesar 57,30 persen. Angka prevalensi stunting di Kecamatan Subah mengalami kenaikan sebesar 2,73 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang artinya upaya penurunan stunting di Kecamatan Subah perlu lebih ditingkatkan kedepannya. Dari 17 desa di Kecamatan Subah terdapat 15 desa yang angka prevalensi stuntingnya mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu Menjangan, Karangtengah, Mangunharjo, Keborangan, Kalimanggis, Jatisari, Subah, durenombo, Clapar, Sengon, Adinuso, Gondang, Kuripan, Kemiri Barat dan Kemiri Timur. Beberapa layanan esensial yang perlu menjadi prioritas

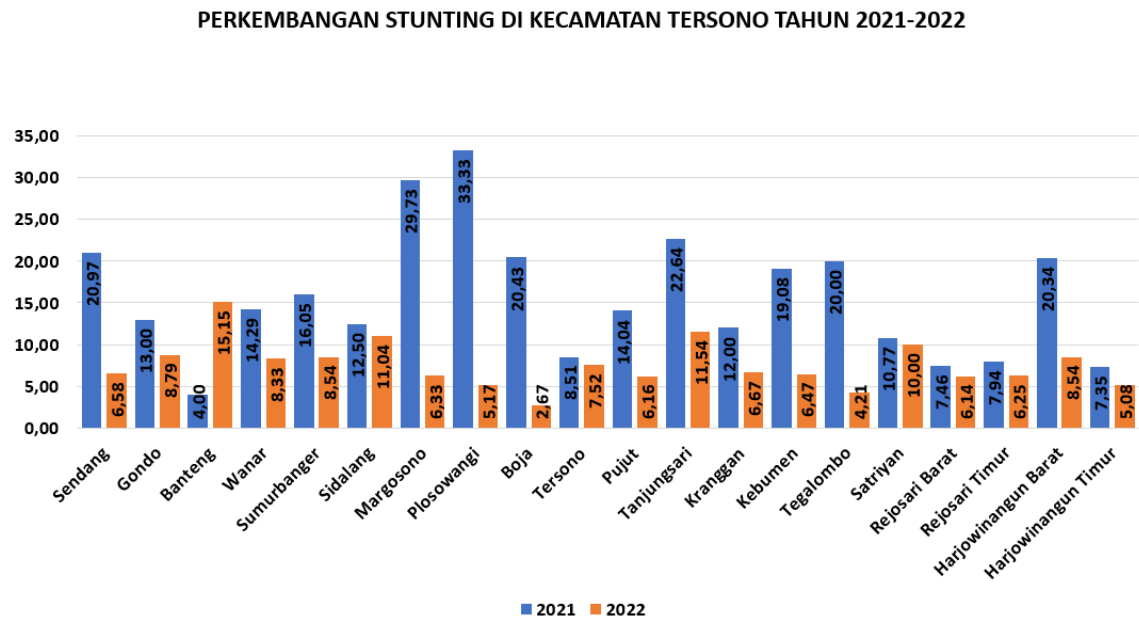
adalah pemberian TTD untuk remaja putri, pemeriksaan kasus anemia untuk remaja putri, promosi gemar makan ikan untuk keluarga beresiko stunting, masih minimnya keluarga beresiko stunting yang mendapatkan pendampingan serta masih terdapat rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak.



12. Kecamatan Tersono

Kecamatan Tersono dengan luas wilayah 5.135,60 ha terdiri dari 20 desa dengan jumlah penduduk sebesar 40.929 jiwa. Berdasarkan data e-PPGBM bulan Pebruari tahun 2022, Kecamatan Tersono memiliki angka prevalensi stunting sebesar 7,56 persen, dengan prevalensi stunting tertinggi di desa Banteng sebesar 15,15 persen, sedangkan prevalensi terendah berada di desa Boja dengan prevalensi stunting sebesar 2,67 persen. Sedangkan rata-rata cakupan 29 layanan esensial sebesar 59,78 persen. Angka prevalensi stunting di Kecamatan Tersono mengalami penurunan sebesar 8,16 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang artinya upaya penurunan stunting di Kecamatan Tersono cukup berhasil. Namun demikian, dari 20 desa di Kecamatan Tersono masih terdapat 1 desa yang angka prevalensi stuntingnya mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu desa Banteng. Beberapa layanan esensial yang perlu menjadi prioritas di desa Banteng adalah pemberian TTD untuk remaja putri, pemeriksaan kasus anemia untuk remaja putri, promosi gemar makan ikan

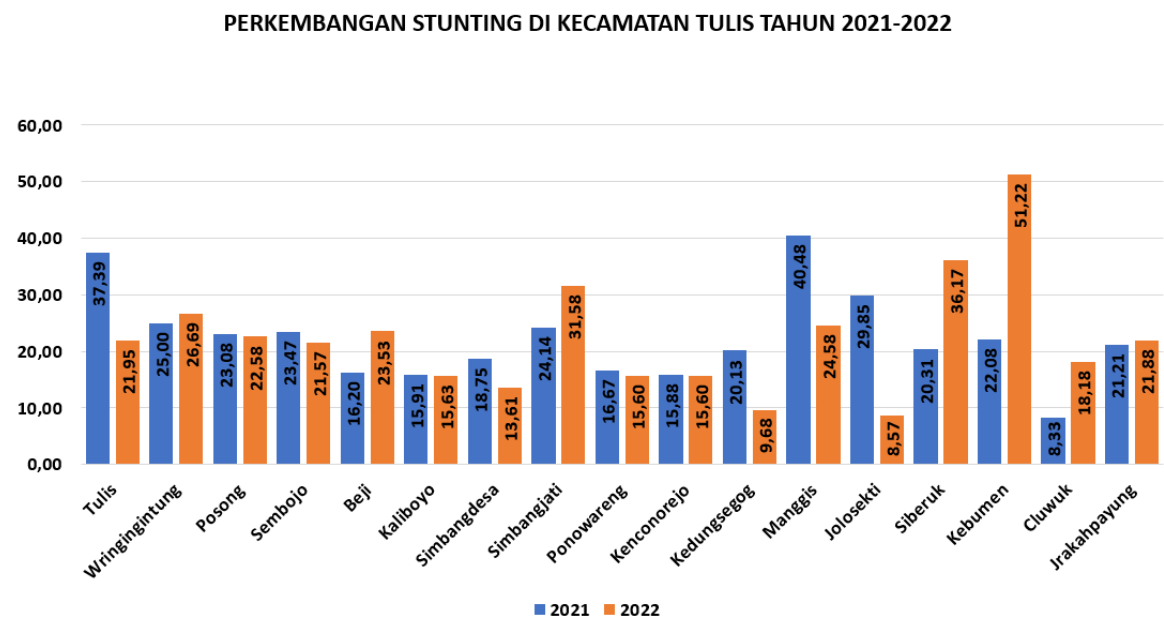
untuk keluarga beresiko stunting, masih minimnya keluarga beresiko stunting yang mendapatkan pendampingan, belum adanya pelayanan KB pasca persalinan serta belum optimalnya pendampingan terkait pemanfaatan pekarangan untuk mendukung asupan gizi keluarga. Demikian juga di 19 desa lainnya, meskipun angka prevalensi stunting telah mengalami penurunan namun cakupan pelayanan perlu terus dioptimalkan karena belum mencakup semua sasaran.



13. Kecamatan Tulis

Kecamatan Tulis dengan luas wilayah 4.419,15 ha terdiri dari 17 desa dengan jumlah penduduk sebesar 39.289 jiwa. Berdasarkan data e-PPGBM bulan Pebruari tahun 2022, Kecamatan Tulis memiliki angka prevalensi stunting sebesar 22,27 persen, dengan prevalensi stunting tertinggi di desa Kebumen sebesar 51,22 persen, sedangkan prevalensi terendah berada di desa Jolosekti dengan prevalensi stunting sebesar 8,57 persen. Sedangkan rata-rata cakupan 29 layanan esensial sebesar 54,39 persen. Angka prevalensi stunting di Kecamatan Tulis mengalami penurunan sebesar 0,02 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang artinya upaya penurunan stunting di Kecamatan Tulis perlu lebih dioptimalkan lagi. Dari 17 desa di Kecamatan Tulis masih terdapat 7 desa yang angka prevalensi stuntingnya mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu desa Wringingintung, Beji, Simbangjati, Siberuk, Kebumen, Cluwuk dan Jrahpayung. Beberapa layanan esensial yang perlu menjadi prioritas di desa

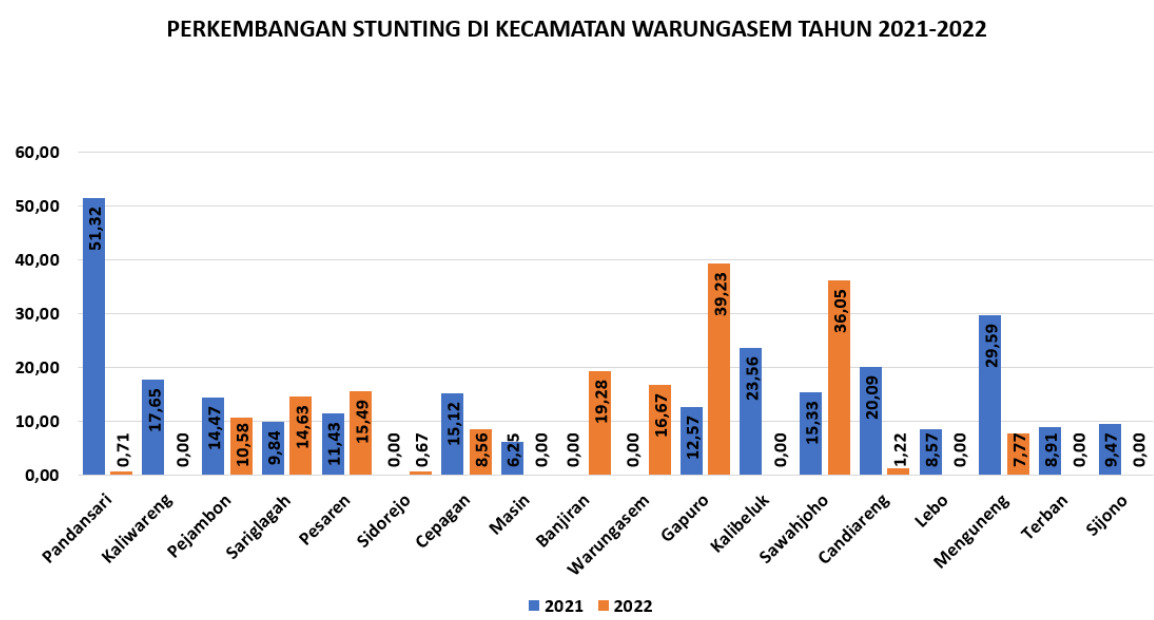
Banteng adalah pemberian TTD untuk remaja putri, pemeriksaan kasus anemia untuk remaja putri, belum optimalnya pemberian PMT ASI, masih minimnya keluarga beresiko stunting yang mendapatkan pendampingan, belum adanya pelayanan KB pasca persalinan serta belum optimalnya pendampingan terkait pemanfaatan pekarangan untuk mendukung asupan gizi keluarga.



14. Kecamatan Warungasem

Kecamatan Warungasem dengan luas wilayah 2.445,61 ha terdiri dari 18 desa dengan jumlah penduduk sebesar 54.232 jiwa. Berdasarkan data e-PPGBM bulan Pebruari tahun 2022, Kecamatan Warungasem memiliki angka prevalensi stunting sebesar 9,49 persen, dengan prevalensi stunting tertinggi di desa Gapuro sebesar 39,23 persen, sedangkan prevalensi terendah berada di desa Kaliwareng, Masin, Kalibeluk, Lebo, Terban dan Sijono dengan prevalensi stunting sebesar 0 persen. Sedangkan rata-rata cakupan 29 layanan esensial sebesar 53,76 persen. Angka prevalensi stunting di Kecamatan Warungasem mengalami penurunan sebesar 6,4 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang artinya upaya penurunan stunting di Kecamatan Tersono cukup berhasil. Meskipun terdapat 6 desa dengan 0 kasus stunting, namun demikian dari 18 desa di Kecamatan Warungasem masih terdapat 7 desa yang angka prevalensi stuntingnya mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu desa Sariglagah, Pesaren, Sidorejo, Banjiran, Warungasem, Gapuro dan Sawahjoho. Beberapa layanan esensial yang perlu menjadi prioritas di desa Banteng

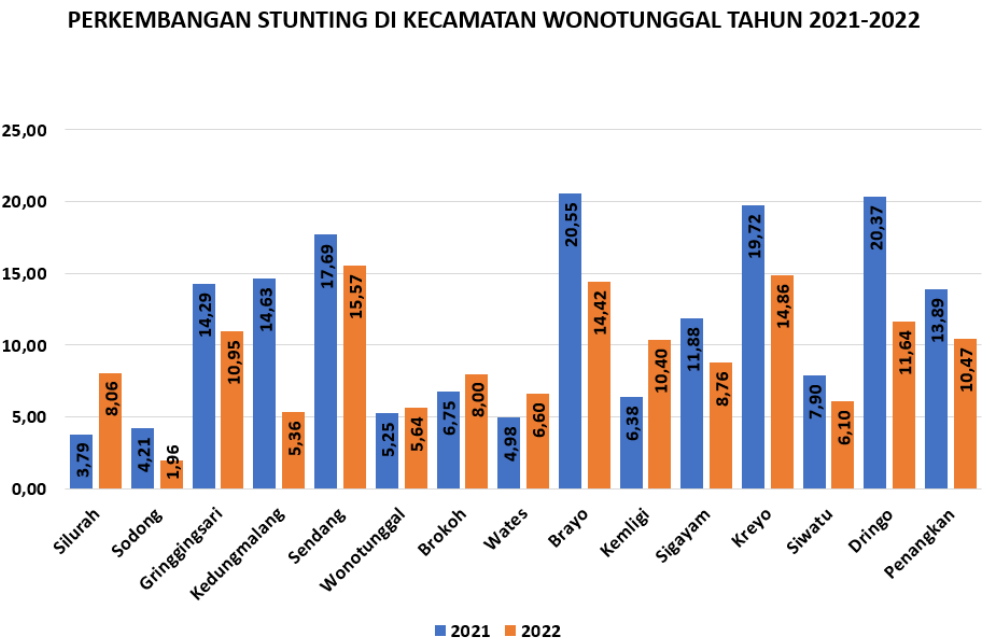
adalah pemeriksaan kasus anemia untuk remaja putri, pemberian promosi makan ikan kepada keluarga beresiko stunting, belum optimalnya pendampingan terkait pemanfaatan pekarangan untuk mendukung asupan gizi keluarga serta masih sedikitnya rumah tangga yang mendapat akses air minum layak.



15. Kecamatan Wonotunggal

Kecamatan Wonotunggal dengan luas wilayah 5.565,54 ha terdiri dari 15 desa dengan jumlah penduduk sebesar 38.482 jiwa. Berdasarkan data e-PPGBM bulan Pebruari tahun 2022, Kecamatan Wonotunggal memiliki angka prevalensi stunting sebesar 9,25 persen, dengan prevalensi stunting tertinggi di desa Sendang sebesar 15,57 persen, sedangkan prevalensi terendah berada di desa Sodong dengan prevalensi stunting sebesar 1,96 persen. Sedangkan rata-rata cakupan 29 layanan esensial sebesar 60,80 persen. Angka prevalensi stunting di Kecamatan Wonotunggal mengalami penurunan sebesar 2,23 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang artinya upaya penurunan stunting di Kecamatan Tersono cukup berhasil, namun masih perlu lebih dioptimalkan lagi. Dari 15 desa di Kecamatan Wonotunggal masih terdapat 5 desa yang angka prevalensi stuntingnya mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu desa Silurah, Wonotunggal, Brokoh, Wates dan Kemligi. Beberapa layanan esensial yang perlu menjadi prioritas di desa Banteng adalah pemeriksaan kasus anemia untuk remaja

putri, pemberian promosi makan ikan kepada keluarga beresiko stunting, pelayanan KB pasca persalinan, belum optimalnya pendampingan kepada keluarga beresiko stunting serta belum semua keluarga beresiko stunting mendapatkan layanan akses air minum layak.



III. PENUTUP

Dalam rangka percepatan penurunan angka prevalensi stunting di Kabupaten Batang, diharapkan komitmen dan dukungan dari semua stakeholder, diantaranya meliputi :

- 1) Melakukan aksi konvergensi dan kolaborasi lintas sektor dan sinergitas program percepatan penurunan stunting dengan program prioritas lainnya melalui integrasi dengan program penanggulangan kemiskinan serta penurunan Angka Kematian Ibu.
- 2) Optimalisasi peran sektor swasta dalam percepatan penurunan Stunting.
- 3) Optimalisasi peran Desa dan Dana Desa dalam percepatan penurunan Stunting serta peningkatan kapasitas Kader Pembangunan Manusia dalam mendukung peningkatan cakupan layanan intervensi di Desa

- 4) Melakukan pengumpulan data dan publikasi data stunting secara berkala dan menggunakan data sebagai dasar untuk melakukan perbaikan program.
- 5) Menyusun kebijakan kampanye perubahan perilaku dan komunikasi antar pribadi untuk percepatan pencegahan stunting.
- 6) Menganggarkan program dan kegiatan percepatan pencegahan stunting pada APBD Kabupaten Batang